

**INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI INKLUSIF DI PULAU SUMATERA**

(Tesis)

Oleh

BOBY SATRIAWAN

NPM 2121021012



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

**INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI INKLUSIF DI PULAU SUMATERA**

Oleh

BOBY SATRIAWAN

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU EKONOMI**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI PULAU SUMATERA

Oleh

BOBY SATRIAWAN

Pembangunan inklusif menjadi tujuan bersama negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Pembangunan yang berkelanjutan dan jangka panjang juga merupakan keinginan dan target setiap negara, yaitu meningkatnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Garis besar dari konsep pembangunan inklusif juga menekankan pemerataan dan keadilan dalam berbagai aspek yang menunjang perekonomian setiap wilayah. Penelitian akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan inklusif 10 provinsi di pulau sumatera. Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu (*time series*) pada periode 2019 – 2023 dan data silang (*cross section*) dengan Data sekunder. Metode yang digunakan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) data panel dengan fix effect model.

Hasil regresi menunjukkan bahwa investasi (INV), belanja bantuan sosial (BBS), dan belanja pendidikan (DAKP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif (IPEI) di 10 Provinsi Pulau Sumatera, untuk setiap kenaikan sebesar 1 miliar rupiah masing-masing variabel akan meningkatkan pembangunan inklusif sebesar 5,23%, 0,56%, dan 0,14%, sementara belanja kesehatan (DAKK) tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah daerah mendorong peningkatan investasi melalui insentif fiskal dan penguatan infrastruktur, mengarahkan bantuan sosial ke program produktif berbasis data terpadu, memperluas akses serta kualitas pendidikan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja lokal, dan tetap memprioritaskan pemerataan layanan kesehatan di daerah terpencil guna mendukung inklusi jangka panjang.

Kata Kunci : Pembangunan Inklusif, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Bantuan Sosial, Pendidikan, Kesehatan

ABSTRACT

GOVERNMENT INVESTMENT AND EXPENDITURE ON INCLUSIVE ECONOMIC DEVELOPMENT IN SUMATERA ISLAND

By

BOBY SATRIAWAN

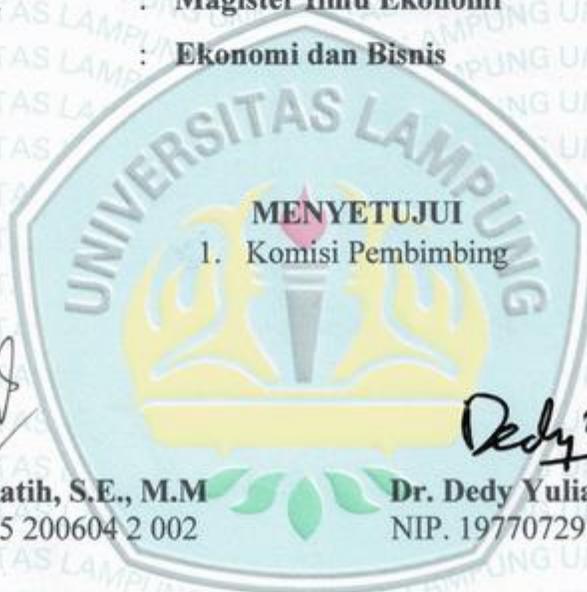
Inclusive development has become a shared goal among countries worldwide, including Indonesia. Sustainable and long-term development is also a universal aspiration, aiming to enhance inclusive and sustainable economic growth, generate productive and comprehensive employment opportunities, and ensure decent work for all. The core concept of inclusive development emphasizes equity and fairness across various sectors that support the economic progress of each region. This study analyzes the factors influencing inclusive development in 10 provinces on the island of Sumatra. The research utilizes secondary data in the form of panel data, combining time series from 2019 to 2023 and cross-sectional data. The method employed is the Ordinary Least Squares (OLS) panel data regression with a fixed effects model.

The regression results show that investment (INV), social assistance spending (BBS), and education spending (DAKP) have a positive and significant effect on inclusive growth (IPEI) in 10 Provinces of Sumatra Island, for every 1 billion rupiah increase each variable will increase inclusive development by 5.23%, 0.56%, and 0.14%, while health spending (DAKK) does not show a significant effect. Based on these findings, it is recommended that local governments encourage increased investment through fiscal incentives and infrastructure strengthening, direct social assistance to productive programs based on integrated data, expand access and quality of vocational education according to local labor market needs, and continue to prioritize equal distribution of health services in remote areas to support long-term inclusion.

Keywords: *Inclusive Development, Investment, Government Expenditure, Social Assistance, Education, Health*

Judul Tesis : **INVESTASI DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI INKLUSIF DI PULAU SUMATERA**

Nama Mahasiswa : **BOBY SATRIAWAN**
No. Pokok Mahasiswa : **2121021012**
Program Studi : **Magister Ilmu Ekonomi**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

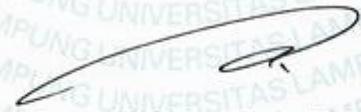


1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Arvina Ratih, S.E., M.M
NIP. 19800705 200604 2 002


Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si
NIP. 19770729 200501 1 001

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi**


Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.
NIP. 19740410 200812 2001

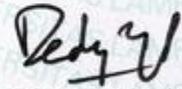
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

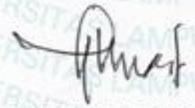
Ketua : Dr. Arivina Ratih Taher, S.E.,M.Si



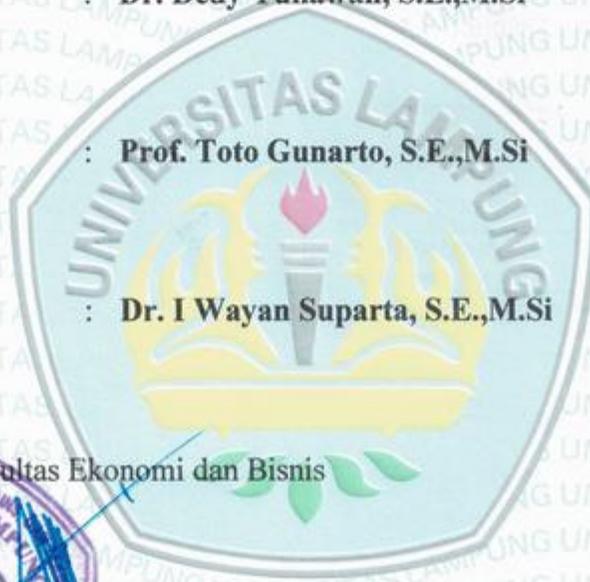
Sekretaris : Dr. Dedy Yulianan, S.E.,M.Si



Anggota : Prof. Toto Gunarto, S.E.,M.Si



Anggota : Dr. I Wayan Suparta, S.E.,M.Si



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian : 12 Juni 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Juni 2025

Penulis



BOBY SATRIAWAN

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Bobby Satriawan dilahirkan pada tanggal 23 Agustus 1994 di Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten OKUS. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Kamisrun dan Ibu Nur Hayati, serta mempunyai seorang istri yang bernama Lilis Handayani dan seorang anak perempuan yang bernama Alisha Kinnas Handawan.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD N 3 Kota Batu Tahun 2007 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kota Batu pada tahun 2010 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Sukau Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2013.

Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur PMPAP Tahun 2013 dan peralihan menjadi Mahasiswa Bidik Misi Tahun 2014/2015 penulis tercatat sebagai Anggota UKM Rohis FEB Unila, Anggota KSPM FEB Unila, dan Anggota UKMBS Unila. Pada tahun 2015 penulis melakukan kuliah Kunjung Lapangan (KKL) ke Bappenas, OJK, dan Museum BI. Pada tahun 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 di desa Setia Bakti Kabupaten Lampung Tengah. Selama masa perkuliahan sarjana penulis sembari merintis dan mendirikan perusahaan yang bernama CV. Hayat Handayani yang bergerak di bidang Produksi Pengolahan Textil dan percetakan dan menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan tingkat magister pada prodi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Lampung.

MOTTO

SUNYIN

Selalu Usaha Niat Yakin Ihtiar Dan Nikmati

“Selalu bersyukur, Sabar itu Indah dan Sebaik Mungkin
Demi Bermanfaat Bagi Orang Lain”

Boby Satiawan

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin puji syukur kehadiran Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Saya persembahkan karya yang cukup sederhana ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati untuk :

Istriku Lilis Handayani dan anaku Alisha Kinnas Handawan yang luar biasa yang selalu sabar serta menjadi sumber inspirasiku dan telah memberikan dukungan tanpa syarat sepanjang waktu. Terima kasih juga kepada Orang Tua ku ayah dan ibu ku serta bapak dan ibu mertuaku yang tidak pernah jenuh memberikan doanya. Kalian adalah anugerah terindah yang tidak ternilai dalam hidupku. Dan juga Adik adiku Silvina dan Tegar dan Apri serta mamas, embak dan adik iparku

Kepada mentor dan dosen yang telah membimbingku, terima kasih atas ilmu dan wawasan yang telah kalian lakukan

Para Dosen Magister Ilmu Ekonomi dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, serta teman-teman yang senantiasa memberikan saran, motivasi, dan doa dalam mengerjakan tesis ini.

Tak lupa Almamater tercinta Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bismillahirrohmaanirrohim.

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, penulis bisa merasakan segala nikmat dan anugerah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“INVESTASI Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Pulau Sumatera”**

Adapun maksud dalam penulisan tesis ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.), pada Program Magister Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis telah banyak memperoleh bimbingan, bantuan serta motivasi dari semua pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Arivina Ratih Taher, SE., M.M selaku Dosen Pembimbing I Bapak Dr Dedy Yuliawan, S.E.,M.Si selaku Pembimbing II dan Ibu Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang begitu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan, kritik, ilmu dan sumbangan pemikiran dalam tesis ini.
5. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Bapak **Prof. Toto Gunarto, S.E.,M.Si** dan Bapak **Dr. I Wayan Suparta, S.E.,M.Si** selaku Dosen Penguji dan Pembahas, yang telah memberikan

saran, arahan, tambahan ilmu sehingga tesis ini dapat selesai dengan hasil yang baik.

7. Istriku Lilis Handayani dan anaku Alisha Kinnas Handawan yang selalu sabar dan mendoakanku.
8. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Kamisrun dan Ibu Nur Hayati yang telah merawat, mendidik, menyayangi, mendoakan, memotivasi, dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan poses perkuliahan.
9. Adik - adiku, Silvina Gustirahayu, Apri Hakiki, Tegar Ramadhan dan semua keluarga besar yang selalu mendoakan dan senantiasa memberikan motivasi penulis selama proses perkuliahan ini.
10. Mertuaku, Bapak Triyono dan ibu Siti Hendriyani dan Keluarga besar mamas, mbak dan adik ipar yang sudah membimbing, membantu, memotivasi dan mendukung dalam menyelesaikan proses tesis ini
11. Kakak Angkatku, Kakak Encep Supriyadi dan Embak Annisa Fitri Dwi mardiah dan keluarga besar yang sudah membimbing memotivasi selama proses tesis ini
12. Para Senior di Keluarga besar Pasca Sarjana FEB Unila Bang Imron, Mbak Desi, dafa, hafids serta kawan – kawan MIE 2021 atas kebersamaan dan kekompakan dalam belajar bersama dan ujian bersama. Keseruan kalian tak akan terlupakan.
13. Sahabat-Sahabatku, Dea dwi Andan (boy), Edi Nurmanto, Kak Boedi, Ismail, Nopry, Regy, Irul, Azhar, Tipan terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini dengan bercandaan, kegilaan, keceriaan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
14. Untuk Crew-Crew ku di CV. Hayat Handayani, Silvina, Apri, Rio, Yuda, Tari, laili, Dani, Pak edi, Nurul, May, Mang Juber, Adi, Mang Ugay, Mas Sugeng, Teh Jujuk Dan Dian saya ucapkan terimakasih

Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terima kasih Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat. Amiiin...

Bandar Lampung, Juni 2025

Penulis

BOBY SATRIAWAN

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR TABEL..... | ii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | iv |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 16 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 17 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 17 |
| | |
| II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS | |
| 2.1 Pembangunan Inklusif..... | 18 |
| 2.1.1 Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif..... | 21 |
| 2.1.2 Pengukuran Pembangunan Ekonomi Inklusif..... | 22 |
| 2.2 Investasi/Penanaman Modal..... | 27 |
| 2.3 Pengeluaran Pemerintah..... | 29 |
| 2.3.1 Pengeluaran Pemerintah Bidang pendidikan dan Kesehatan | 33 |
| 2.3.2 Pengeluaran Pemerintah dalam Kesejahteraan Sosial | 36 |
| 2.4 Tinjauan Empiris..... | 39 |
| 2.5 Kerangka Pemikiran..... | 47 |
| 2.6 Hipotesis Penelitian..... | 50 |
| | |
| III. METODELOGI PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis, Sumber data, Variabel Penelitian dan Lokasi Penelitian | 51 |
| 3.1.2 Definisi Oprasional Variabel..... | 52 |
| 3.2 Regresi Linier Berganda dengan Panel Data | 54 |
| 3.2.1 Pemilihan Model Data Panel..... | 55 |
| 3.3 Pengujian Asumsi Klasik | 59 |
| 3.3.1 Deteksi Multikolinearitas | 59 |
| 3.3.2 Uji Heterokedastisitas | 59 |
| 3.3.3 Uji Autokorelasi..... | 60 |

| | |
|--|----|
| 3.4 Uji Hipotesis t dan F statistik..... | 60 |
| 3.4.1 Uji t (<i>t-test</i>) | 60 |
| 3.4.2 Uji F-Statistik..... | 61 |
| 3.5 Individual Effect..... | 62 |

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Gambaran Umum Penelitian..... | 63 |
| 4.1.1 Gambaran umum Perkembangan Pembangunan Inklusif 10 Provinsi di Sumatera | 63 |
| 4.2 Statistik Deskriptif..... | 66 |
| 4.3 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel..... | 67 |
| 4.3.1 Uji Chow | 68 |
| 4.3.2 Uji Hausman..... | 68 |
| 4.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)..... | 69 |
| 4.4 Pengujian Asumsi Klasik..... | 70 |
| 4.4.1 Uji Multikolonieritas | 70 |
| 4.4.2 Uji Heterokedastisitas | 71 |
| 4.4.3 Uji Autokorelasi | 72 |
| 4.5 Hasil Estimasi Ordinary Least Square (OLS) Data Panel dengan Fixed Effect Model | 72 |
| 4.6 Pengujian Hipotesis Hipotesis | 75 |
| 4.6.1 Uji t-Statistik | 75 |
| 4.6.2 Hasil Uji F- Statistik..... | 76 |
| 4.7 Hasil dan Analisis Individual Effect | 77 |
| 4.8 Hasil dan Pembahasan | 81 |

V. KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-------------------------------|-----|
| 5.1 Kesimpulan | 103 |
| 5.2 Saran dan Kebijakan | 104 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Penelitian Terdahulu..... | 39 |
| 2. Nama Variabel, Simbol, Satuan, dan Sumber Data..... | 51 |
| 3. Statistik Deskriptif..... | 65 |
| 4. Hasil Uji Chow/Fixed Effect | 68 |
| 5. Hasil Uji Husman/Random Effect | 68 |
| 6. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)..... | 69 |
| 7. Hasil Pengujian Multikolinieritas | 70 |
| 8. Hasil Deteksi Masalah Heterokedastisitas..... | 71 |
| 9. Hasil Deteksi Masalah Autokorelasi | 72 |
| 10. Hasil Ordinary Least Square (OLS) Pada Model <i>Fixed Effect</i> | 73 |
| 11. Hasil Uji t pada tingkat signifikansi 95% dan $df = 45$ | 75 |
| 12. Hasil Uji F pada tingkat kepercayaan 95 persen | 77 |
| 13. Hasil Individual Effect 10 Provinsi di Pulau Sumatera..... | 77 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 1. Konsep Pembangunan Inklusif..... | 3 |
| 2. Rata-rata Pembangunan Ekonomi Inklusif 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023..... | 5 |
| 3. Rata-rata investasi PMA dan PMDN 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023. | 9 |
| 4. Rata-rata Belanja sosial 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Milliar). | 12 |
| 5. Rata-rata Belanja pendidikan dan kesehatan 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Rp)..... | 14 |
| 6. Model teoritis pendorong Pembangunan inklusif..... | 24 |
| 7. Kurva Pengeluaran pemerintah. | 29 |
| 8. Kerangka Pemikiran. | 49 |
| 9. Pemilihan Model Data Panel. | 55 |
| 10. Perkembangan Pembangunan Inklusif (IPEI) 10 Provinsi di Sumatera Tahun 2019-2023..... | 64 |
| 11. Perbandingan investasi terhadap pembangunan inklusif pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019-2023..... | 82 |
| 12. Rata-rata perbandingan Kontribusi bantuan sosial (%) terhadap Pembangunan inklusif pada 10 Provinsi di Pulau sumatera | 87 |
| 13. Rata-rata perbandingan Kontribusi belanja pendidikan (%) terhadap Pembangunan inklusif pada 10 Provinsi di Pulau sumatera..... | 93 |
| 14. Rata-rata perbandingan Kontribusi belanja kesehatan (%) terhadap Pembangunan inklusif pada 10 Provinsi di Pulau sumatera tahun 2019-2023.... | 99 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

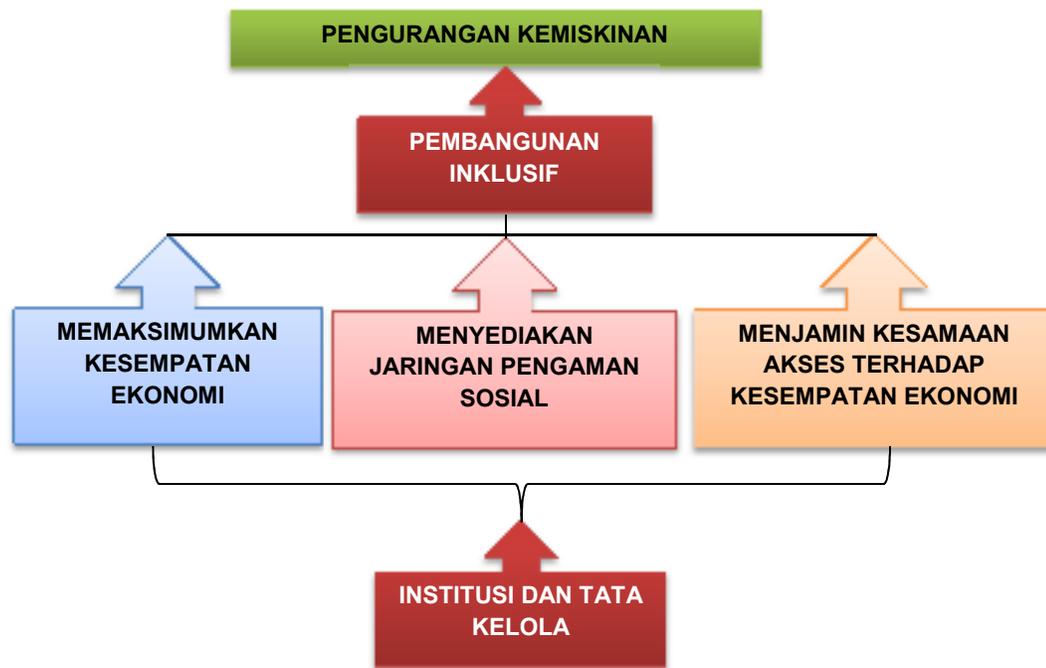
Pembangunan ekonomi inklusif menjadi tujuan ke-8 dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Point kedelapan juga menjelaskan Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (*Decent Work and Economic Growth*). Oleh sebab itu, banyak penelitian dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif agar tujuan ke-8 SDGs dapat tercapai pada tahun 2030.

Pergeseran paradigma pemerintah Indonesia terlihat dari Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No.59 Tahun 2017 tentang Sustainable Development Goals (SDGs). Poin kedelapan dalam SDGs menargetkan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan yang disertai terciptanya lapangan kerja yang layak bagi semua (UNDP, 2017). Capaian ini diukur dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Sejalan dengan itu, McKinley (2010) mengidentifikasi bahwa pembangunan inklusif menciptakan dan memperluas peluang ekonomi serta memastikan akses peluang yang lebih luas sehingga tingkat kemiskinan dan ketimpangan menurun. Pada dasarnya terdapat tiga aspek utama yang diperhatikan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan partisipasi kerja. Sementara itu, Anand et al. (2013) menyatakan dalam kajiannya

bahwa ada dua dimensi pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perekonomian.

Menurut Prasetyantoko, dkk (2012), pembangunan ekonomi inklusif adalah Pembangunan untuk semua orang, tidak peduli latar belakang dan perbedaan-perbedaannya. Hal ini senada dengan pendapat Ali dan Son (2007) yang menyatakan bahwa pembangunan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang miskin. Pertumbuhan didefinisikan sebagai inklusif jika meningkatkan fungsi kesempatan sosial, yang tergantung pada dua faktor yaitu: (i) peluang rata-rata yang tersedia bagi masyarakat, dan (ii) bagaimana peluang dibagi kepada masyarakat. Ini berfokus pada penciptaan peluang ekonomi dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang di masyarakat di semua tingkatan, tidak hanya bagi orang miskin. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang menekankan bahwa peluang ekonomi yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi tersedia secara bebas untuk semua, terutama masyarakat miskin (Tambunan, 2015).

Pembangunan ekonomi inklusif memiliki sejumlah elemen, yang meliputi pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas lapangan kerja, pembangunan pertanian, pembangunan industri, pembangunan sektor sosial, pengurangan kesenjangan regional, perlindungan lingkungan, dan pemerataan pendapatan. Di antara elemen-elemen ini, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan telah mendapat perhatian paling besar dalam studi empiris, secara eksplisit atau implisit, pertumbuhan ekonomi inklusif. (Alesina and Rodrik, 1994; Barro, 2000). Pertumbuhan yang inklusif memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan terlepas dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda (Hill, Khan, Zhuang 2012), Penjelasan ini juga di kuatkan dengan kerangka bagan sebagai berikut:



Sumber: Hill, Khan, Zhuang 2012
Gambar 1. Konsep Pembangunan inklusif

Pada gambar 1 menjelaskan tentang konsep pembangunan inklusif. Dalam pertumbuhan yang inklusif, upaya mengurangi kemiskinan merupakan tujuan utama. Untuk mencapai tujuan ini, pertumbuhan yang inklusif tergantung dari tiga komponen penting: keberhasilan memaksimalkan kesempatan atau peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat; ketersediaan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat; dan keberhasilan menjamin keadilan akses terhadap kesempatan kerja. Ketiga komponen dasar dari pembangunan yang inklusif sangat tergantung pada aspek institusi dan tata kelola. Menurut Hausmann, Rodrik, dan Velasco (2005). Kerangka teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan suatu negara ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu akumulasi modal sosial, adanya kegagalan pasar maupun pemerintah, dan tingginya biaya investasi.

Konsep Pembangunan inklusif juga dijelaskan oleh kerangkaan badan perencanaan pembangunan nasional (BAPPENAS), bapennas yang membagi menjadi 3 Pilar utama, yaitu 1. Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi yang menjelaskan

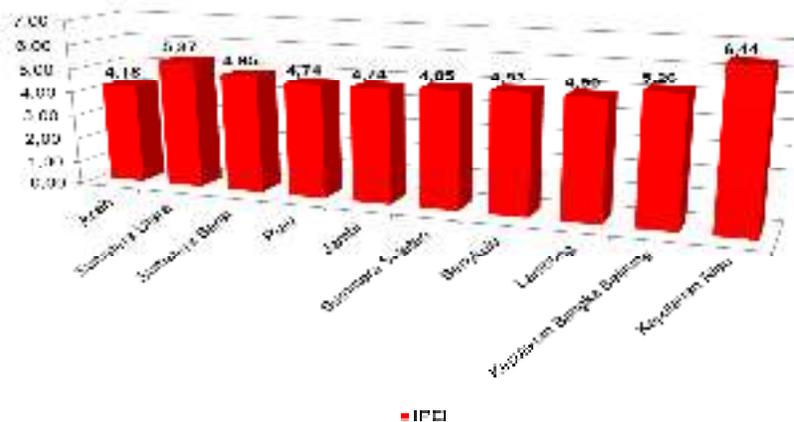
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat, 2. Pemerataan pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan dan 3. Perluasan Akses dan Kesempatan. Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

Ketiga Pilar ini menjadi bahan acuan penting yang harus dianalisis sesuai karakteristik wilayah hambatan dan faktor-faktor apa saja yang dapat memperlambat ketiga pilar pembangunan inklusif pada setiap wilayah di Indonesia. Menurut (Bappenas, 2020), Pulau Sumatera dalam pertumbuhan dan pembangunan inklusif memiliki proyeksi yang baik dengan produktivitas perekonomian yang terus meningkat, tetapi sisi berbeda melihat dari komponen-komponen makro ekonomi tingkat ketimpangan, kemiskinan, pengangguran dan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi inklusif dapat dikatakan sebagai pendekatan baru dalam teori-teori pertumbuhan (Khan, A., Khan, G., Safdar, S., Munir, S., & Andleeb, Z, 2016). Hal tersebut sesuai dengan definisi UNDP bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga manfaat pertumbuhan tersebut dinikmati oleh semua pihak. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi memang dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan. Namun demikian, agar pertumbuhan tersebut bersifat berkelanjutan dalam jangka panjang, harus terdapat pemerataan di seluruh sektor.

Perspektif jangka panjang tersebut menekankan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, dimana inklusivitas mengacu pada kesetaraan peluang dalam hal akses ke pasar, sumber daya, dan lingkungan peraturan yang tidak memihak individu (Dixit, R., & Ghosh, M, 2013). Pulau Sumatera dalam masalah pembangunan inklusif

masih masuk kepada kategori stagnan tidak naik maupun turun. konsep pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi krusial karena menitikberatkan pada partisipasi seluruh lapisan masyarakat serta pemerataan hasil pembangunan. Indonesia telah mengintegrasikan agenda ini dalam RPJMN 2020–2024, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan secara merata.

Namun demikian, pencapaian pertumbuhan inklusif antar wilayah masih menunjukkan disparitas. Pulau Sumatra, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, masih menghadapi tantangan serius terkait ketimpangan distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. (Kuncoro, 2020), mengungkapkan bahwa tingkat inklusivitas ekonomi di Sumatra lebih rendah dibandingkan wilayah Jawa, yang antara lain disebabkan oleh dominasi sektor primer, rendahnya tingkat industrialisasi, dan belum optimalnya kontribusi sektor UMKM. (Bappenas, 2021) dan temuan (Arisman dan Priyarsono, 2018) mempertegas bahwa beberapa provinsi di Sumatra, seperti Aceh, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, masih memiliki Indeks Pertumbuhan Inklusif di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara potensi ekonomi Sumatra dengan pencapaian inklusivitas pertumbuhannya. Perkembangan pertumbuhan Ekonomi inklusif di 10 Provinsi di pulau Sumatera disajikan sebagai berikut :



Gambar 2. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023

Gambar 2, menjelaskan bagaimana perkembangan pembangunan inklusif di 10 Provinsi pulau Sumatera indeks pembangunan inklusif menurut BAPPENAS dikategorikan sebagai berikut; Skala 1-3 kurang memuaskan, Skala 4-7 memuaskan dan Skala 8-10 sangat memuaskan. Keseluruhan IPEI 10 provinsi di Sumatera masuk dalam kategori memuaskan. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) di berbagai provinsi wilayah Sumatera, yang dinilai berdasarkan skala 1–10. Berdasarkan klasifikasi skala yang diberikan (1–3 = kurang memuaskan, 4–7 = memuaskan, 8–10 = sangat memuaskan), seluruh provinsi berada dalam kategori "memuaskan", yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi relatif inklusif namun belum mencapai taraf yang sangat optimal. Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi dengan skor IPEI sebesar 6,44, mencerminkan kinerja pembangunan yang lebih merata dan aksesibilitas yang relatif baik terhadap hasil pertumbuhan ekonomi. Hal ini konsisten dengan perannya sebagai pusat industri dan perdagangan di kawasan barat Indonesia, meskipun seperti ditunjukkan grafik sebelumnya, provinsi ini juga memiliki TPT tertinggi, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam distribusi kesempatan kerja.

Sumatera Utara (5,37) dan Kepulauan Bangka Belitung (5,26) menyusul dengan skor IPEI cukup tinggi, menunjukkan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan upaya inklusivitas. Kedua provinsi ini kemungkinan telah memiliki strategi pembangunan daerah yang lebih merata, baik dari sisi infrastruktur maupun penyediaan layanan publik. Provinsi seperti Sumatera Barat (4,95), Bengkulu (4,93), Lampung (4,90), dan Sumatera Selatan (4,85) memiliki nilai IPEI yang relatif stabil di kisaran menengah, menunjukkan bahwa walaupun ekonomi tumbuh, dampak pemerataan dan keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal akses terhadap lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, Riau dan Jambi masing-masing berada pada skor 4,74, berada di ambang bawah kategori memuaskan. Hal ini dapat mencerminkan masih adanya ketimpangan dalam distribusi hasil pertumbuhan, meskipun daerah-daerah tersebut kaya akan sumber daya alam. Terakhir, Aceh memiliki nilai terendah sebesar 4,18, menandakan bahwa meskipun

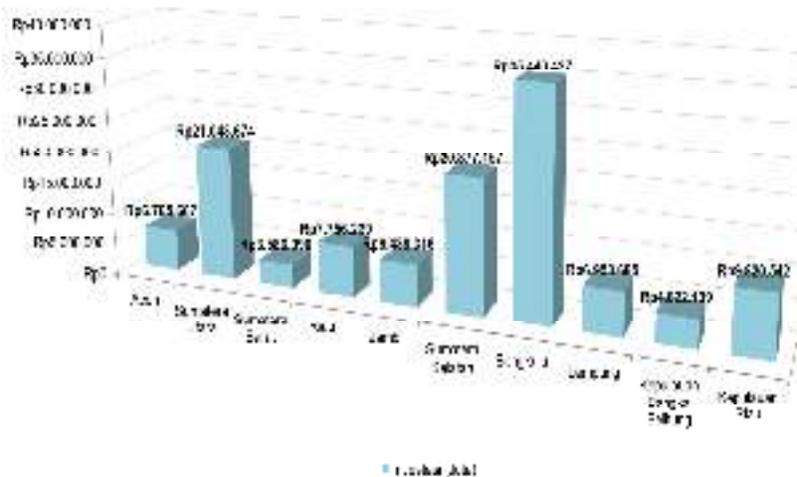
pertumbuhan ada, inklusivitasnya masih lemah. Ini sejalan dengan tingginya tingkat pengangguran di Aceh seperti pada grafik sebelumnya. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa belum ada satu pun provinsi di Sumatera yang mencapai kategori "sangat memuaskan" dalam hal pembangunan inklusif. Oleh karena itu, tantangan utama di kawasan ini adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan agar lebih merata, dengan memperkuat kapasitas lokal, pemerataan akses ekonomi, dan pengembangan sektor-sektor yang padat karya.

Birdsall (2007) berpendapat bahwa pembangunan inklusif (*inclusive growth*), merupakan pertumbuhan yang kondusif untuk meningkatkan ukuran dan kemampuan ekonomi kelasmenengah. Menurut *Asian Development Bank* (2011), ada beberapa alasan mengapa pertumbuhan harus inklusif yaitu: (i) pertimbangan kesetaraan dan keadilan, pertumbuhan seharusnya terdistribusi dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat dan daerah. (ii) Pertumbuhan dengan ketimpangan yang persisten dapat membahayakan kondisi sosial, seperti orang miskin dan pengangguran lebih rentan masuk dalam aktivitas kriminal, perempuan lebih rentan ke prostitusi, dan tenaga kerja anak tidak diharapkan. Pertumbuhan ekonomi inklusif telah menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan oleh akademisi dan praktisi ekonomi pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. World Bank mendefinisikan pembangunan inklusif sebagai pertumbuhan yang merata dan dapat menciptakan kesetaraan kesempatan bagi semua orang melalui penciptaan lapangan kerja, perluasan pasar, konsumsi, serta produksi bagi masyarakat miskin sehingga kondisi hidup lebih baik dapat tercapai (Klasen, 2017). Pertumbuhan ekonomi inklusif mendorong setiap individu untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan komponen lainnya yang menunjang standar hidup yang lebih baik, (Kristyanto & Kaluge, 2018).

Struktur perekonomian dan komposisi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi telah diyakini sebagai faktor penting untuk mencapai pembangunan inklusif, dengan pernyataan umum bahwa pertumbuhan yang lebih kuat pada struktur tertentu akan mempercepat penurunan kemiskinan. (Anis Rahmawati, 2021). pertumbuhan ekonomi menjadi syarat utama supaya tercipta penurunan kemiskinan, Dengan

adanya peningkatan ekonomi yang memang belum cukup untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, namun itu pun menjadi suatu yang sangat diperlukan. Pada kenyataan tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi tidak begitu berarti bagi menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat bila tidak di ikuti dengan adanya pemerataan pendapatan oleh sebab itu dibutuhkan peran pemerintah untuk memacu keadilan dan inklusifitas dalam pertumbuhan.

Investasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kapasitas ekonomi suatu negara secara menyeluruh. Investasi menunjukkan keterkaitan positif terhadap pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif. Temuan dari berbagai penelitian memberikan indikasi awal bahwa investasi memiliki potensi memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif. Secara teoritis, hubungan antara investasi dan pembangunan inklusif dapat dijelaskan melalui kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka model dinamis Keynesian, produk domestik bruto (PDB) atau output suatu negara merupakan hasil dari akumulasi empat komponen utama, yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan net ekspor ($X-M$), (Mokhov et al., 2023). Berdasarkan model ini, peningkatan nilai investasi akan mendorong peningkatan output secara agregat, yang secara umum disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Hubungan ini juga diperkuat oleh berbagai bukti empiris. Salah satunya disampaikan oleh (Febiyansah, 2017), yang menyimpulkan bahwa investasi asing langsung (FDI) memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah gambaran perkembangan pma dan pmdn 10 Provinsi di pulau Sumatera:



Gambar 3. Rata-rata investasi PMA dan PMDN 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023.

Berdasarkan data perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di 10 provinsi di Pulau Sumatera, terlihat adanya variasi yang signifikan antarwilayah dalam hal nilai investasi. Provinsi Bengkulu mencatat nilai investasi tertinggi sebesar Rp35,44 triliun, angka yang sangat menonjol dibandingkan provinsi lainnya dan kemungkinan disebabkan oleh proyek strategis berskala besar, terutama di sektor energi atau pertambangan. Di posisi selanjutnya, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan masing-masing mencatat investasi sebesar Rp21,04 triliun dan Rp20,88 triliun. Kedua provinsi ini dikenal memiliki basis industri dan infrastruktur yang relatif matang serta akses logistik yang baik, menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi regional di bagian utara dan selatan Pulau Sumatera.

Kepulauan Riau mencatat investasi sebesar Rp9,82 triliun, yang didorong oleh letaknya yang strategis dekat Singapura serta kawasan industri Batam dan Bintan. Meskipun demikian, angka ini masih di bawah tiga besar dan bisa mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan. Provinsi Riau yang kaya akan sumber daya alam mencatat investasi sebesar Rp7,75 triliun, namun potensi ini tampaknya belum sepenuhnya tergarap akibat hambatan seperti konflik lahan dan keterbatasan infrastruktur. Sementara itu, provinsi Lampung, Aceh, dan Jambi masing-masing

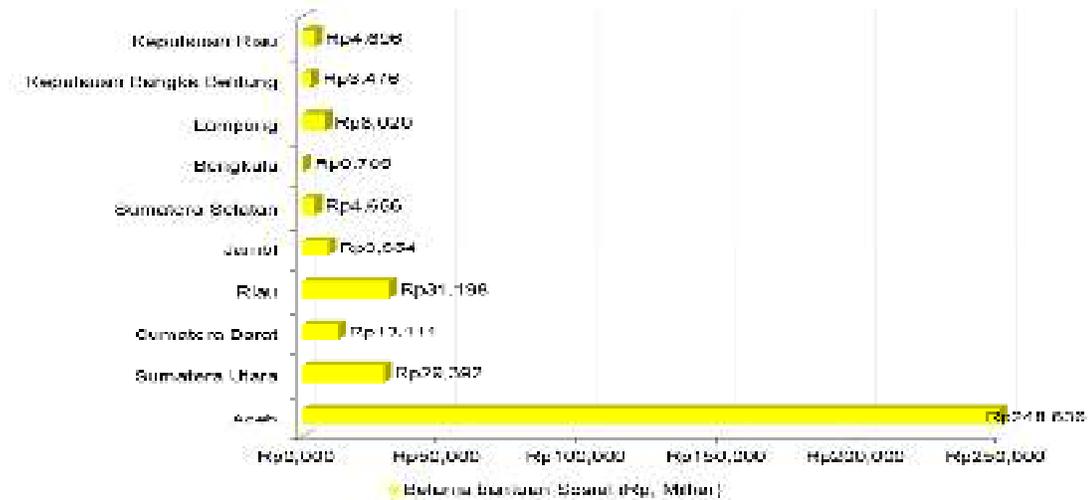
mencatat investasi antara Rp6,4 hingga Rp7 triliun. Lampung memiliki keunggulan geografis dekat dengan Jawa dan basis agroindustri yang kuat, sedangkan Aceh mulai menunjukkan pertumbuhan pasca-konflik melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus. Jambi memiliki potensi di sektor perkebunan, namun fluktuasi harga komoditas memengaruhi stabilitas investasinya.

Dibagian bawah, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Barat mencatat nilai investasi yang relatif rendah, yaitu masing-masing Rp4,62 triliun dan Rp3,59 triliun. Bangka Belitung masih bergantung pada sektor tambang timah tanpa hilirisasi yang memadai, sedangkan Sumatera Barat menghadapi tantangan topografi dan akses logistik yang kurang mendukung, meskipun memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan pertanian. Secara keseluruhan, ketimpangan investasi antarprovinsi di Sumatera cukup jelas, dengan konsentrasi di wilayah yang memiliki akses infrastruktur memadai dan lingkungan bisnis yang kondusif. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan konektivitas antarprovinsi, pemberian insentif fiskal bagi wilayah dengan investasi rendah, serta diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran, penelitian lanjutan disarankan mencakup analisis hubungan antara desentralisasi fiskal, kemudahan berusaha regional, dan dampak pembangunan infrastruktur terhadap pola investasi di Pulau Sumatera.

Penelitian oleh (Hidayat et al, 2020) mengungkapkan bahwa baik investasi domestik maupun investasi asing berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif. Dalam konteks serupa, (Bello et al, 2022) menegaskan bahwa investasi asing langsung (FDI) memainkan peran penting dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa pengaruh tersebut menjadi semakin signifikan apabila didukung oleh difusi teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu, (Kang dan Vazquez, 2021) menyimpulkan bahwa FDI dapat menjadi pendorong pembangunan inklusif, terutama di negara-negara yang memiliki sektor industri yang kuat serta infrastruktur yang telah berkembang dengan baik.

Penguatan kembali hubungan antar wilayah menjadi penting dalam hal mencapai pertumbuhan yang inklusif agar hasil dari ekonomi dapat dirasakan oleh semua pihak, harus adanya peran pemerintah dari sisi fiskal melalui pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat karena cakupannya yang lebih sempit maka hal tersebut cenderung lebih efektif dan efisien kapasitas fiskal daerah dan elastisitas fiskal dapat mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, (Murad, 2019). Terpadu dari pembangunan nasional melalui pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat secara merata, dan meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal, (Dyah Hapsari et al., 2018).

Salah satu aspek penting dari pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja sosial adalah perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Belanja sosial seperti subsidi pendidikan, kesehatan, bantuan tunai bersyarat, dan program perlindungan sosial lainnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, sekaligus memperkuat daya beli dan produktivitas mereka dalam jangka panjang. Dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan memperkecil kesenjangan ekonomi, belanja sosial dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam aktivitas ekonomi. Hal ini diperkuat oleh temuan (Ali dan Son, 2007) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran sosial pemerintah memiliki korelasi positif terhadap pembangunan inklusif di negara berkembang, karena mampu menurunkan ketimpangan sekaligus mengurangi kemiskinan secara bersamaan. (Chadha V, Chadda I, 2020), belanja untuk jaminan sosial dan kesejahteraan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan inklusif, sedangkan belanja untuk kesejahteraan kelas terpinggirkan dan pembangunan pedesaan berhubungan negatif dengan pembangunan inklusif. Berikut adalah gambaran belanja sosial pada 10 Provinsi di Pulau Sumatra:



Gambar 4. Rata-rata Belanja sosial 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Milliar)

Data belanja bantuan sosial dari pemerintah di wilayah Sumatera menunjukkan disparitas yang cukup besar antar provinsi. Aceh menempati posisi tertinggi dengan alokasi sebesar Rp248,636 miliar, jauh melampaui provinsi lainnya. Angka ini mencerminkan perhatian khusus pemerintah terhadap Aceh, kemungkinan besar karena status kekhususan daerah serta tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di wilayah tersebut. Setelah Aceh, Riau (Rp31,198 miliar) dan Sumatera Utara (Rp29,392 miliar) menjadi dua provinsi dengan belanja bantuan sosial terbesar berikutnya, mencerminkan kebutuhan sosial yang masih cukup tinggi meskipun wilayah ini tergolong lebih maju secara ekonomi dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi seperti Sumatera Barat (Rp13,111 miliar) dan Jambi (Rp9,554 miliar) berada di tingkat menengah, yang mungkin menunjukkan tantangan sosial yang moderat atau efisiensi dalam program distribusi bantuan. Sementara itu, Lampung (Rp8,020 miliar) dan Kepulauan Riau (Rp4,696 miliar) memiliki tingkat belanja yang lebih rendah meskipun memiliki populasi yang cukup besar, yang bisa menandakan adanya keterbatasan anggaran daerah atau fokus kebijakan yang berbeda.

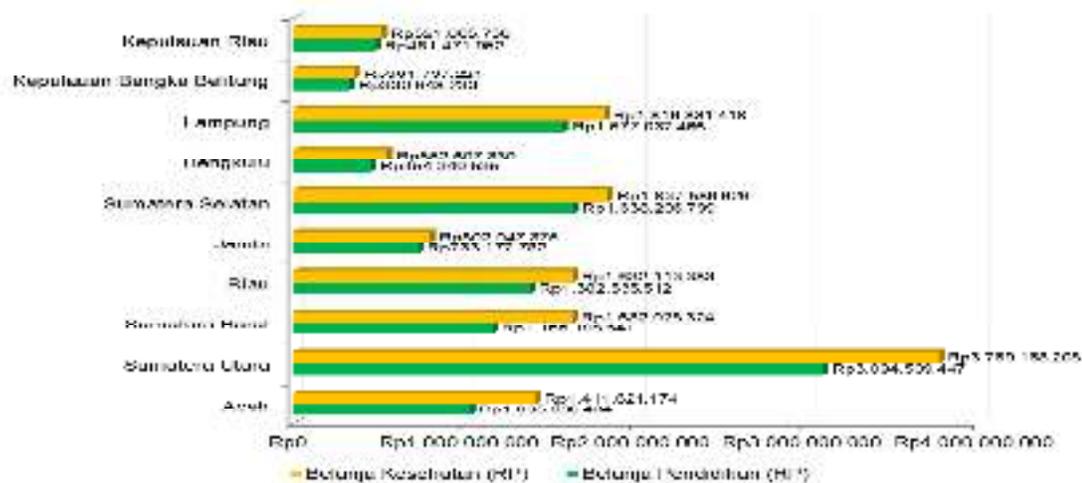
Provinsi yang menonjol adalah Bengkulu, yang hanya mencatat belanja sosial sebesar Rp0,705 miliar, dan Kepulauan Bangka Belitung (Rp3,476 miliar) serta Sumatera Selatan (Rp4,666 miliar) yang berada pada angka rendah. Ini berpotensi menunjukkan kurangnya alokasi dana untuk kesejahteraan sosial atau minimnya data

penerima bantuan yang teridentifikasi secara administratif. Rendahnya belanja sosial ini bisa berdampak terhadap ketimpangan dan kurangnya perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Secara keseluruhan, perbedaan signifikan dalam belanja bantuan sosial antar provinsi ini mencerminkan ketidaksamaan prioritas fiskal dan mungkin pula kapasitas fiskal daerah, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial di wilayah Sumatera. Optimalisasi dan harmonisasi kebijakan antar wilayah diperlukan agar distribusi bantuan sosial benar-benar mendukung pengurangan ketimpangan antar daerah.

Belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di 33 provinsi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio belanja daerah untuk fungsi perlindungan sosial terhadap belanja total memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun belanja bantuan sosial penting untuk mengurangi kemiskinan, efektivitasnya dalam mendorong pembangunan inklusif mungkin terbatas jika tidak diiringi dengan penguatan sektor produktif dan investasi jangka panjang, (Primawan, M, 2020). (Farhan, M. H, 2023). Dalam tesisnya, Farhan menganalisis pengaruh belanja modal, belanja sosial, dan akses keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa belanja sosial, termasuk bantuan sosial, memiliki peran penting dalam meningkatkan kelangsungan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Dengan memberikan bantuan langsung, belanja sosial membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam aktivitas ekonomi, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan yang lebih inklusif.

Belanja pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya menjadi bagian dari kebahagiaan dan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat kemampuan individu dan meningkatkan kualitas populasi sebagai faktor produksi yang vital. Investasi dalam pendidikan mendorong pembangunan manusia yang lebih baik melalui

pemberian layanan seperti pendidikan formal, kesehatan, budaya, dan olahraga kepada masyarakat lokal (Sijabat, 2022). Di sisi lain, kesehatan juga merupakan kebutuhan fundamental dalam pembangunan manusia. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pengurangan angka kematian, kesakitan, dan perbaikan status gizi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan di seluruh tingkat pemerintahan (Anggraeni et al., 2023). Berikut adalah gambaran belanja pendidikan dan kesehatan pada 10 Provinsi di Pulau Sumatra:



Gambar 5. Rata-rata Belanja pendidikan dan kesehatan 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023 (Rp)

Belanja pendidikan dan kesehatan di provinsi-provinsi wilayah Sumatera menunjukkan variasi yang mencerminkan prioritas pembangunan masing-masing daerah. Provinsi Aceh mengalokasikan anggaran secara proporsional antara pendidikan sebesar Rp1,03 triliun dan kesehatan sebesar Rp1,41 triliun. Sumatera Utara mencatat belanja tertinggi di kedua sektor, yakni Rp3,77 triliun untuk kesehatan dan Rp3,09 triliun untuk pendidikan, menandakan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di Sumatera Barat, anggaran untuk kesehatan (Rp1,63 triliun) lebih besar dibanding pendidikan (Rp1,17 triliun), menunjukkan kecenderungan memperkuat sektor kesehatan. Riau juga menunjukkan distribusi yang relatif seimbang dengan Rp1,63 triliun untuk kesehatan dan Rp1,38 triliun untuk

pendidikan. Jambi, meskipun memiliki angka lebih rendah (Rp802 miliar untuk kesehatan dan Rp733 miliar untuk pendidikan), tetap menjaga keseimbangan antarsektor.

Sementara itu, Sumatera Selatan menempatkan kedua sektor sebagai prioritas dengan anggaran Rp1,84 triliun untuk kesehatan dan Rp1,64 triliun untuk pendidikan. Bengkulu dan Lampung juga memperlihatkan belanja yang berimbang, masing-masing Rp553 miliar dan Rp454 miliar untuk Bengkulu, serta Rp1,82 triliun dan Rp1,58 triliun untuk Lampung. Provinsi kepulauan seperti Bangka Belitung dan Kepulauan Riau menunjukkan angka lebih rendah namun tetap seimbang: Bangka Belitung Rp362 miliar (kesehatan) dan Rp331 miliar (pendidikan); Kepulauan Riau Rp522 miliar dan Rp481 miliar. Secara keseluruhan, distribusi belanja antara sektor pendidikan dan kesehatan di setiap provinsi menegaskan pentingnya kedua bidang tersebut dalam mendukung pembangunan inklusif dan pembangunan sumber daya manusia di wilayah Sumatera.

Berbagai penelitian telah meneliti hubungan antara belanja pemerintah dan pembangunan inklusif. Penelitian oleh (Prabowo DH, Maski G, Santoso DB, 2022). di Indonesia menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan tingkat inklusi keuangan dapat mendorong pembangunan inklusif, sementara belanja pemerintah pada sektor ekonomi berdampak negatif karena meningkatnya kesenjangan pembangunan, dan tidak ada peningkatan inklusivitas yang diamati dari alokasi anggaran di sektor kesehatan dan perlindungan sosial. (Afriliana SN, 2022), juga melakukan penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan investasi asing berpengaruh positif terhadap pembangunan inklusif, sedangkan investasi domestik tidak berkontribusi terhadap pembangunan inklusif. (Safitri MID, Ananda CF, Prasetyia F, 2021), menemukan bahwa pengeluaran untuk fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan PDRB per kapita memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pembangunan inklusif. Namun, dalam jangka pendek, pengeluaran fungsi ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran tidak mempengaruhi pembangunan inklusif.

Pembangunan inklusif menjadi tujuan bersama negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Pembangunan yang berkelanjutan dan jangka panjang juga merupakan keinginan dan target setiap negara, hal ini juga dikuatkan oleh tujuan ke 8 Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Garis besar dari konsep pembangunan inklusif juga menekankan pemerataan dan keadilan dalam berbagai aspek yang menunjang perekonomian setiap wilayah. Pada keadaan karakteristik di Pulau Sumatera dengan 10 Provinsi pertumbuhan inklusif yang masuk skala rata-rata memuaskan dan nilai yang masih cenderung rendah untuk mencapai kategori sangat memuaskan, Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata, penting untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Beberapa indikator strategis yang patut menjadi perhatian adalah tingkat investasi, belanja bantuan sosial, serta belanja pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan. investasi mencerminkan sejauh mana masyarakat mampu mengakses peluang kerja, sedangkan belanja bantuan sosial menunjukkan peran negara dalam melindungi kelompok rentan. Di sisi lain, investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, memahami keterkaitan antara keempat variabel tersebut dengan pembangunan inklusif menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, terutama dalam menekan ketimpangan dan memperluas akses masyarakat terhadap manfaat pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh investasi terhadap pembangunan ekonomi Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera ?
2. Bagaimanakah pengaruh belanja bantuan sosial terbuka terhadap pembangunan ekonomi Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera ?

3. Bagaimanakah pengaruh belanja pendidikan terhadap pembangunan ekonomi Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera ?
4. Bagaimanakah pengaruh belanja kesehatan terhadap pembangunan ekonomi Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap pembangunan ekonomi Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja bantuan sosial terhadap pembangunan ekonomi Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
3. Untuk menganalisis pengaruh belanja pendidikan terhadap pembangunan ekonomi Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
4. Untuk menganalisis pengaruh belanja kesehatan terhadap pembangunan ekonomi Inklusif di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan negara dalam membantu mengentaskan mengembangkan kemajuan pembangunan ekonomi Inklusif serta faktor-faktor apa saja yang perlu di intervensi melalui kebijakan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan perekonomian yang lebih inklusif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi Inklusif

Konsep pembangunan inklusif berkembang sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap model pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya berfokus pada peningkatan indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa mempertimbangkan distribusi manfaat dari pertumbuhan tersebut. Meskipun banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, manfaat dari pertumbuhan ini sering kali tidak terdistribusi secara merata, sehingga memperbesar ketimpangan ekonomi dan memarginalkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Indikator ekonomi seperti PDB dan PDB per kapita selama ini digunakan secara luas untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun, indikator ini memiliki keterbatasan yang signifikan, khususnya dalam menggambarkan kualitas dan inklusivitas pertumbuhan. Salah satu kelemahan utama PDB adalah ketidakmampuannya untuk mencerminkan distribusi pendapatan di antara penduduk. PDB hanya menghitung total nilai barang dan jasa yang diproduksi, tanpa memberikan gambaran mengenai siapa yang menerima manfaat dari pertumbuhan tersebut. Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali disertai dengan peningkatan ketimpangan pendapatan.

Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* menekankan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya diukur berdasarkan perluasan kapabilitas individu untuk hidup secara bermakna, bukan semata-mata berdasarkan pertumbuhan pendapatan. Bersama Joseph Stiglitz dan Jean-Paul Fitoussi, Sen (2009) juga

mengkritik keterbatasan PDB dalam mengukur kualitas hidup, distribusi pendapatan, dan keberlanjutan dalam *The Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Dalam *The Price of Inequality* (2012), Stiglitz memperingatkan bahwa ketimpangan yang meningkat dapat mengancam stabilitas sosial dan demokrasi.

Thomas Piketty (2014) dalam *Capital in the Twenty-First Century* memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan distribusi yang adil, maka ketimpangan akan semakin dalam. Demikian pula, Dani Rodrik (2011) dalam *The Globalization Paradox* menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang inklusif agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh semua kalangan. Tony Atkinson (2015) dan Branko Milanovic (2016) juga menyuarakan kritik serupa terhadap PDB sebagai indikator yang tidak mencerminkan pemerataan hasil pembangunan, serta mendesak perlunya reformasi kebijakan distribusi.

Pertumbuhan merupakan syarat penting bagi terciptanya pertumbuhan inklusif. Klasen (ADB, 2010) menyatakan bahwa penting untuk menentukan episode ekonomi seperti apa yang memiliki karakteristik sebagai pertumbuhan yang inklusif. Ada dua kemungkinan untuk hal tersebut, yang pertama melihat melalui proses. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan yang meluas antar sektor atau intensif terhadap tenaga kerja. Dengan begitu pembangunan inklusif dapat dikatakan sebagai pertumbuhan yang melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi. Fokus kedua yaitu pada hasil dari proses pertumbuhan. Dalam hal ini, konsep pembangunan inklusif berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang *pro poor*. Pembangunan inklusif di Asia telah muncul sejak pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesenjangan (Klasen, 2010). Pertumbuhan dengan kesenjangan yang terus berlangsung dalam sebuah negara dapat menyebabkan kegaduhan sosial dan politik serta mendorong terjadinya tindak kriminal dari kelompok masyarakat yang merasa haknya (untuk hidup layak) tercabut (ADB, 2011). Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan saja tidaklah cukup

untuk memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Konsep inklusifitas kemudian muncul sebagai kebijakan utama untuk terus didorong dan memasukkan kebutuhan masyarakat miskin dan masyarakat yang rentan menjadi miskin

Terdapat berbagai indikator mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang telah dirumuskan dan didefinisikan oleh beberapa organisasi internasional. Masing-masing institusi tersebut merumuskan berbagai indikator yang berbeda-beda. Bank Dunia (2008), misalnya, sangat menekankan pada kebijakan industri padat tenaga kerja dibandingkan pada distribusi pendapatan. Membangun iklim kondusif yang mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan produktifitas diasumsikan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pendapatan bagi tenaga kerja sebagai aset yang penting bagi masyarakat miskin. Di sisi lain, *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) mendorong pertumbuhan pro-poor yang dapat memberikan dampak non-pendapatan (kesehatan, pendidikan, dan sebagainya) demi kesejahteraan masyarakat miskin. *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Suryanarayana (2008) memberikan definisi mengenai pembangunan inklusif berdasarkan sisi produksi dan pendapatan Gross Domestic Product (GDP), yaitu proses dan hasil pertumbuhan dimana semua pihak dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama dari pertumbuhan tersebut. Dengan demikian pertumbuhan inklusif akan merepresentasikan pemerataan.

Definisi lain disajikan oleh ADB melalui Strategi 2020-nya yang mengidentifikasi pertumbuhan inklusif ke dalam dua fokus strategi yaitu sustainable income growth (pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan) dan kesempatan yang terbuka bagi semua pihak (Klasen, 2010). Rusastra (2011) dalam analisisnya mengemukakan paradigma pembangunan inklusif pada dasarnya adalah : (1) pembangunan pro kelompok miskin; (2) laju pertumbuhan ekonomi; dan (3) mencegah kerusakan lingkungan. Terdapat keterkaitan kuat antar ketiganya.

Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi akan mendorong perbaikan distribusi pendapatan, yang memiliki ketergantungan pada efisiensi dan konservasi penggunaan sumber daya. Konsekuensinya, pilihan prioritas sektoral adalah pembangunan pertanian berkelanjutan dengan tetap memprioritaskan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

2.1.1 Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif

World Bank (2018) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan yang menurunkan kemiskinan serta menjamin keamanan ekonomi untuk semua lapisan masyarakat. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini, pendekatan *World Bank* terkait pembangunan inklusif menekankan pada pemerataan. Sejalan dengan itu, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan pembangunan inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan peluang bagi seluruh penduduk dan mendistribusikan dividen peningkatan kemakmuran secara adil pada seluruh lapisan masyarakat, baik dalam hal moneter maupun non moneter. Menurut Singh (2017) pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi ketimpangan antara sektor pertanian dan nonpertanian. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi inklusif tidak hanya fokus pada tingginya angka pertumbuhan melainkan juga kesetaraan yang diukur dari penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat. Studi literatur yang dilakukan oleh Sitorus dan Arsani (2018) mengenai konsep pertumbuhan ekonomi inklusif memberikan beberapa interpretasi sebagai berikut :

1. Menurut Prasetyantoko et al. (2012), pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan untuk semua orang, tanpa melihat latar belakang dan perbedaan- perbedaannya
2. Ali dan Son (2007) menyatakan bahwa pembangunan inklusif merupakan pertumbuhan yang bukan hanya menciptakan peluang ekonomi baru, melainkan juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan

masyarakat, khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah

3. Strategi *Asian Development Bank* (2020) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kesetaraan kesempatan. Definisi pertumbuhan ekonomi inklusif tersebut mengacu pada konsep pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Ali dan Zuang (2007) dan Zuang (2010) dimana terdapat tiga dimensi kebijakan dan *good governance* and institution menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan memastikan semua lapisan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan.

2.1.2 Pengukuran Pembangunan Ekonomi Inklusif

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi inklusif. Ali dan Son (2007) menyatakan bahwa terdapat tiga kunci pengukuran dalam mencapai hasil pembangunan inklusif yaitu menciptakan kesempatan kerja dan mendorong produktivitas yang lebih tinggi, mengembangkan kemampuan SDM melalui investasi pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, dan menyediakan jaminan sosial dan intervensi untuk membantu masyarakat yang rentan dan/atau kekurangan McKinley (2010) mengukur pembangunan inklusif dengan membentuk sebuah indeks yaitu indeks komposit pembangunan inklusif. Terdapat empat dimensi penyusun indeks komposit pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu dimensi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja produktif, dan infrastruktur; dimensi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kesetaraan gender; dimensi kapabilitas; dan dimensi perlindungan sosial

Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi pengembangan konsep dan definisi operasional pembangunan ekonomi inklusif. Konsep dan definisi operasional pembangunan ekonomi inklusif menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi inklusif yang terukur dalam bentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). IPEI merupakan alat untuk dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi,

maupun kabupaten/kota. IPEI mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan Kementerian PPN/Bappenas mendefinisikan IPEI sebagai pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Indeks ini terdiri dari tiga pilar dan 8 sub pilar serta 21 indikator. Pilar 1 pertumbuhan dan perkembangan ekonomi terdiri dari 3 sub-pilar yang memuat 9 indikator. Kemudian, Pilar 2 pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan terdiri dari 2 sub-pilar (5 indikator). Di dalam pilar 3 perluasan akses dan kesempatan terdiri dari 3 sub-pilar yang memuat 7 indikator. Pembangunan Inklusif memiliki beberapa pilar dan indikator sebagai berikut:

Pilar 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi: Mengukur kapasitas ekonomi suatu wilayah dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan meluas. Terdiri dari sub-pilar berikut:

- Sub-Pilar 1.1 – Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan PDB (atau PDRB) per kapita/tahunan sebagai ukuran utama kapasitas ekonomi meningkat.
- Sub-Pilar 1.2 – Kesempatan Kerja: Indikator seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan serapan tenaga kerja.
- Sub-Pilar 1.3 – Infrastruktur Ekonomi: Ketersediaan dan kualitas fasilitas ekonomi: jalan, listrik, telekomunikasi, dan akses logistik.

Pilar 2: Pemerataan Pendapatan & Pengurangan Kemiskinan

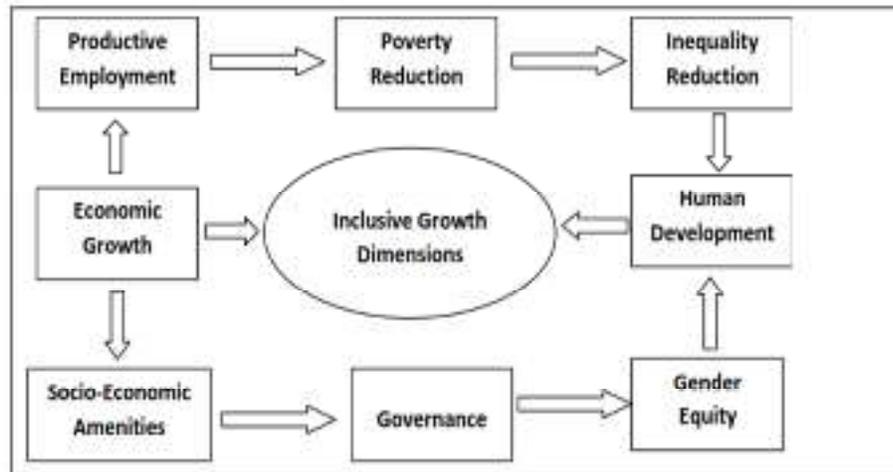
Menilai sejauh mana hasil pertumbuhan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat

- Sub-Pilar 2.1 Ketimpangan : Indikator gini ratio Mengukur kesenjangan distribusi pendapatan. Semakin kecil nilai Gini, semakin inklusif distribusinya.
- Sub-Pilar 2.2 Kemiskinan: Persentase Penduduk Miskin Mengukur proporsi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Pilar 3: Perluasan Akses & Kesempatan: Menilai akses masyarakat ke layanan dasar dan kesempatan ekonomi yang inklusif

- Sub-Pilar 3.1 – Kapabilitas Manusia: Akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta indikator seperti harapan lama sekolah, angka melek huruf, dan status gizi.
- Sub-Pilar 3.2 – Infrastruktur Dasar: Ketersediaan layanan dasar: sanitasi, air bersih, listrik di rumah tangga, transportasi, dan perumahan layak.
- Sub-Pilar 3.3 – Keuangan Inklusif: Akses masyarakat ke layanan keuangan formal: jumlah rekening bank, inklusi asuransi, pinjaman mikro/UMKM.

Han & Thorat (2013) menyatakan bahwa pembangunan inklusif adalah elastisitas pertumbuhan kemiskinan yang pada setiap titik waktu, pengurangan kemiskinan adalah tujuan keseluruhan dari setiap kebijakan. Anand dkk. (2013) berpendapat bahwa inklusivitas pertumbuhan tergantung pada dua faktor, pertumbuhan pendapatan dan distribusi pendapatan.:



Sumber: Diadaptasi dari Paramasivan et al. (2014)

Gambar 6 : Model teoritis pendorong pembangunan inklusif

Sebuah studi yang dilakukan oleh Paramasivan et al. (2014) mengidentifikasi delapan pendorong (a) pertumbuhan ekonomi, (b) lapangan kerja produktif, (c) pengurangan kemiskinan, (d) pengurangan ketimpangan, (e) pembangunan manusia, (f) kesetaraan

gender, (g) infrastruktur sosial-ekonomi dasar , dan (h) tata kelola pembangunan inklusif mengikuti interaksi.

Menurut Sihombing, (2022), IPEI dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pembangunan ekonomi dalam mencapai inklusivitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Aisyah Safitri, 2024) menganggap IPEI sebagai alat ukur yang krusial, yang tidak hanya mengevaluasi hasil ekonomi namun juga menilai seberapa jauh pembangunan tersebut dapat diakses oleh semua segmen masyarakat. Pendekatan ini dipertegas oleh (Maryam dan Irwan, 2022), yang mengaitkan peningkatan nilai IPEI dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi, dimana masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap manfaat dari pertumbuhan ekonomi. IPEI memfokuskan pada tiga dimensi utama yang dianggap sebagai pilar pembangunan ekonomi inklusif:

1. **Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi:** Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap sebagai syarat mutlak untuk pembangunan inklusif. Todaro dan Smith (2015) menekankan bahwa tanpa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sulit untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. Penelitian oleh (Ravallion, 2024), Bourguignon (2003), serta Dollar dan Kraay (2002) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.
2. **Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan:** Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan: Fokus pada pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan merupakan inti dari pendekatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Dollar dan Kraay (2002) dalam penelitian mereka menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi secara umum menguntungkan orang miskin dan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada peningkatan pendapatan kelompok miskin. Lebih lanjut, strategi pro-poor growth yang dianalisis oleh Ravallion (2004) menunjukkan bahwa kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan kelompok miskin dapat secara

signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. Pendekatan *shared growth* juga penting di mana pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan distribusi pendapatan yang lebih adil untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya, sebagaimana ditunjukkan oleh studi Bourguignon (2003), yang menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang memperhatikan redistribusi pendapatan.

3. Perluasan Akses dan Kesempatan: Konsep *broad-based growth* memainkan peran penting dalam pembangunan inklusif dengan menekankan pada pentingnya menyediakan akses yang merata ke sumber daya ekonomi. Todaro dan Smith (2015) dalam karya mereka menekankan bahwa akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas adalah kunci untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berkontribusi dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Mereka berargumen bahwa tanpa perluasan akses ini, pertumbuhan ekonomi cenderung tidak merata dan hanya dinikmati oleh segmen tertentu dari masyarakat. Penelitian oleh (Barro, 1991) juga mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa peningkatan dalam akses pendidikan dan kesehatan berhubungan langsung dengan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, perluasan akses dan kesempatan ini tidak hanya memperkuat dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan, yang vital bagi pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan nilai IPEI, oleh karenanya, menjadi indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan berhasil dalam menciptakan akses yang lebih luas dan kesempatan yang lebih merata, menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa IPEI tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai panduan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

2.2 Investasi/Penanaman Modal

Investasi/penanaman modal Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan suatu penambahan modal. Penambahan modal ini berupa investasi dan tabungan. Di satu sisi tabungan domestik rendah sedangkan, di sisi lain kebutuhan dana untuk membiayai investasi besar (meningkat terus setiap tahun mengikuti pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pasar). Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tabungan dan investasi: $S - I < 0$ ($S < I$). Ini berarti negara tersebut mengalami investment-saving gap atau I-S gap positif (atau S-I gap negatif). Di Indonesia seperti banyak di negara berkembang lainnya selisih ini ditutup dengan arus modal asing, mulai dari hibah, pinjaman resmi (antarpemerintah disebut dengan G to G loans), hingga investasi, baik yang sifatnya jangka panjang (PMA) atau jangka pendek (portofolio investment). Dapat dikatakan bahwa secara hipotesis ada suatu korelasi positif antara I-S gap dan ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dana dari luar negeri (Tambunan, 2001). Defisit karena adanya I-S gap yang telah berlangsung secara persistent tersebut harus dapat dibiayai dari capital inflows agar tidak mengganggu cadangan devisa yaitu dengan investasi. Investasi/penanaman modal merupakan pengeluaran untuk membeli barang – barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan terutama menambah barang-barang modal perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Sukirno, 2000).

Investasi merupakan penambahan barang modal secara netto positif, (Mangkusoebroto, 1998). Secara umum investasi di Indonesia dibedakan menjadi dua macam yaitu: penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN, menurut undang-undang No.6 tahun 1968 PMDN adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. PMA merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (direct investment) maupun investasi yang tidak langsung/portofolio, (Suyatno, 2003). Investasi asing di

Indonesia dibagi menjadi dua macam yaitu: Penanaman Modal Asing/FDI dan investasi portofolio.

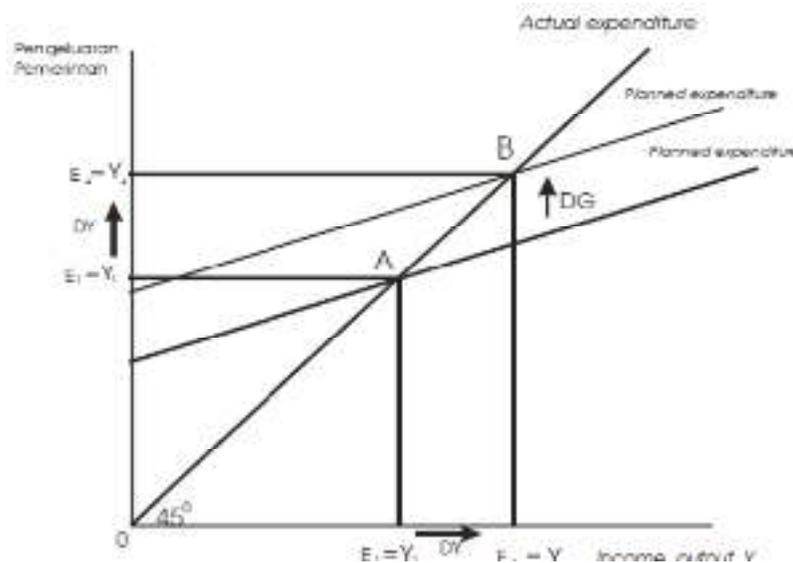
Menurut Undang-Undang No.11 tahun 1970 PMA merupakan penanaman modal asing yang meliputi penanaman modal asing secara langsung yang digunakan untuk menjalankan proyek di Indonesia, dalam hal ini pemilik modal secara langsung menanggung resiko atas penanaman modal tersebut. PMA merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksana, sehingga dinamika usaha yang menyangkut dinamika perusahaan yang ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai, tidak lepas dari pihak yang berkepentingan/investor asing (Purnomo&Ambarsari, 2005). Menurut (Krugman, 1991) PMA adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri.

Terdapat 3 (tiga) kondisi yang harus dipenuhi jika suatu perusahaan melakukan PMA, yaitu: (1) perusahaan harus memiliki beberapa keunggulan kepemilikan dibandingkan perusahaan lain; (2) harus lebih menguntungkan dengan memanfaatkan sendiri keunggulan tersebut daripada menjual atau menyewakan ke perusahaan lain; dan (3) harus lebih menguntungkan dengan menggunakan keunggulan tersebut dalam kombinasi dengan paling tidak beberapa input yang berlokasi di luar negeri (Sarwedi, 2002). Investasi tidak langsung (portofolio) merupakan investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau ekuitas, dengan harapan mendapatkan manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham dalam negeri oleh orang/perusahaan asing tanpa kontrol manajemen di perusahaan investasi (Purnomo& Ambarsari, 2005). Capital inflows untuk menutup adanya I-S gap dapat berupa PMA baik FDI, portofolio, ataupun pinjaman luar negeri (baik oleh pemerintah maupun swasta). Pembiayaan defisit transaksi berjalan melalui PMA yang FDI dipandang sebagai langkah yang paling aman dalam membiayai pembangunan, karena dana

tersebut biasanya digunakan untuk kepemilikan dan kontrol atas pembangunan pabrik, peralatan, dan prasarana. Dengan demikian PMA tersebut meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sementara capital inflows dalam bentuk pinjaman memungkinkan untuk digunakan membeli barang-barang konsumsi, bukan untuk barang investasi. Disamping itu, capital inflows melalui PMA yang FDI bersifat tidak lancar (tidak mudah ditarik dananya oleh investor), sehingga investor tidak dapat menarik dananya dengan segera. Hal ini berbeda dengan capital inflows dalam bentuk portofolio yang dapat ditarik secara mendadak dan dalam jumlah besar.

2.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1993). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003). Berikut adalah gambaran kurva pengeluaran pemerintah secara makro:



Gambar 7. Kurva Pengeluaran pemerintah
Sumber: (Mangkoesebroto, 1997)

Pada gambar 7, dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y). Bailey (1995) dalam (Mangkoesebroto, 1997) membagi teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara particular komponen-komponen pengeluaran pemerintah. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesebroto, 1993): 1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. 2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. 3. Teori Peacock & Wiseman.

Pengeluaran pemerintah sering juga disebut pengeluaran publik, karena merupakan pengeluaran untuk membiayai program pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik. Peraturan Pemerintah RI nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, memberikan definisi pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam peraturan pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan tiga jenis pelayanan publik kepada masyarakat yaitu pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Dalam menjalankan aktivitas pembangunan nasional dan pelayanan publik, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar. Pengeluaran pemerintah merupakan kombinasi produk yang dihasilkan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pengadaan dan pemeliharaan barang publik, biaya pelaksanaan jasa publik, dan pelayanan administratif. Setiap aktivitas pemerintah yang tercermin dari pengeluaran pemerintah

sebaiknya memiliki dampak positif dalam pembangunan daerah dan negara, pembangunan perekonomian, dan pembangunan manusia.

Pengeluaran Pemerintah Rudy Badrudin menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada dasarnya setiap pengeluaran negara dilakukan atas landasan prinsip optimalisasi pemanfaatan dana untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Pengeluaran pemerintah harus mampu mencapai beberapa sasaran, seperti peningkatan produktivitas kerja aparatur pemerintah, perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan serta terpeliharanya berbagai aset negara dan hasil-hasil pembangunan. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Umumnya biaya pembangunan tersebut diprogramkan dalam Daftar Isian Proyek (DIP).

Pengeluaran pembangunan semuanya diprogramkan dalam berbagai proyek di setiap sektor dan sub sektor. Pengeluaran pembangunan tersebut dialokasikan ke berbagai sektor sesuai dengan urutan prioritas dan kebijakan pembangunan (Pakasi, 2005). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah

telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1993; 169). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003; 263). Bailey (1995; 43) membagi teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro.

Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, Bailey (1995; 43) membagi teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara particular komponen-komponen pengeluaran pemerintah. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesebroto, 1993), Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah:

a. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.

Hukum Wagner menyatakan bahwa jika gaji per kapita meningkat, pengeluaran pemerintah relatif akan meningkat. Ekspansi belanja pemerintah akan mendorong kekecewaan pasar dan eksternalitas. Hukum Wagner memiliki kelemahan dimana hukumnya tidak berlandaskan dengan suatu kajian tentang pemilihan barang-barang public. Wagner menyatukan perspektifnya sehubungan dengan dugaan hipotesis dimana negara yang menganggap otoritas publik sebagai orang yang bebas untuk bertindak, diluar dari warga negara lainnya.

b. Teori Peacock & Wiseman.

Peacock dan Wiseman mengajukan asumsi lain mengenai mengklarifikasi perbuatan formatif pengeluaran pemerintah. Otoritas publik semakin meningkatkan pajak untuk mendukung rencana pengeluarannya. Di lain sisi, warga negara malas membayarkan pajak, terutama jika pemabayaran pajak terus

ditambah atau naik. Pertimbangkan untuk mengumpulkan biaya, dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak. Dalam keadaan ini, memicu munculnya suatu keadaan yang disebut dengan efek pengalihan (*displacement effect*), dimana keadaan yang menimbulkan ketidak tenangan social sehingga membuat kegiatan swasta dialihkan kepada aktivitas/kegiatan pemerintah.

2.3.1 Pengeluaran Pemerintah Bidang pendidikan dan Kesehatan

Alokasi dari pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan manusia merupakan fungsi dari tiga hal, yaitu total pengeluaran sektor publik, berapa banyak yang dialihkan untuk sektor-sektor yang berhubungan dengan peningkatan pembangunan manusia dan bagaimana dana tersebut dialokasikan ke dalam sektor tersebut (Ramirez, 1998). Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan manusia melalui penyediaan pelayanan dasar akan sangat memengaruhi kualitas human capital di masa yang akan datang. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi warganya dengan menyediakan pelayanan dasar guna memenuhi hak-hak penduduknya. Pelayanan dasar yang mencakup di dalamnya pelayanan publik seperti layanan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan akan mempunyai pengaruh pada pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan merupakan pengeluaran pemerintah yang sangat mendasar dalam pembangunan manusia. Pendidikan merupakan bagian penting dalam pencapaian kapabilitas manusia, yang juga bersifat esensial bagi kehidupan masyarakat. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi modern, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, pendidikan juga memainkan peranan penting dalam mengembangkan kapasitas dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable growth*).

Pendidikan merupakan investasi yang akan selalu berdampak pada waktu yang akan datang. Pendidikan menjadi modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan bangsa. Pemerintah harus menyediakan alokasi belanja pada sektor pendidikan yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan serta melakukan investasi dalam membentuk modal manusia (human capital). Modal manusia merupakan investasi produktif terhadap orang-orang; mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan gagasan (Todaro & Smith, 2011). Hal ini merupakan komponen penting dalam rangka mendukung program pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dengan skema benefit spillover. Besarnya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan akan menentukan seberapa besar pencapaian hasil pembangunannya.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan mempunyai kaitan yang erat. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana modal kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di sektor pendidikan (Todaro & Smith, 2011). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang lebih sehat akan memperoleh upah yang lebih tinggi. Pengaruh kesehatan terhadap peningkatan penghasilan telah terbukti secara dalam beberapa penelitian yang dilakukan dengan menerapkan teknik statistik. Tingginya produktivitas para pekerja yang lebih sehat memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik (Todaro & Smith, 2011).

Investasi pemerintah di bidang kesehatan dapat berupa alokasi anggaran untuk membiayai pengadaan dan pemeliharaan sarana fisik dan nonfisik untuk di bidang kesehatan. Pemerintah membangun sarana dan prasarana publik sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap pelayanan di sektor kesehatan. Dengan kemudahan masyarakat mendapat akses terhadap layanan kesehatan, maka kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan dapat dipenuhi sehingga kualitas kehidupan masyarakat menjadi meningkat. Dengan mengoptimalkan pengeluaran

pemerintah, dalam hal ini khususnya pengeluaran untuk kepentingan kesehatan, maka kualitas kesehatan yang lebih baik dapat dihasilkan sehingga produktivitas yang tinggi akan lebih mudah dicapai.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana. Menurut (Supriyadi, 2003) biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan uang).

Dalam hal ini pemerintah merupakan fasilitator bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih luas. Gambaran yang dapat diambil guna melihat seberapa jauh peran pemerintah untuk menjadi fasilitator dari pembangunan manusia adalah melalui kebijaksanaan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang paling menentukan dalam suksesnya pembangunan manusia adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan, sehingga dua sektor tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi input dalam proses pembangunan di berbagai sektor. Menurut (Todaro dan Smith, 2015), sumber daya manusia merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan dalam proses pembangunan suatu negara, sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang bersifat pasif,

manusialah yang merupakan agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber daya alam dan melaksanakan pembangunan nasional.

2.3.2 Pengeluaran Pemerintah dalam Kesejahteraan Sosial

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena mereka belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang belum menerima pelayanan

Menurut (Nasikun, 1996), kesejahteraan dapat digambarkan sebagai persamaan makna dari konsep martabat manusia, yang dapat dilihat melalui empat indikator: (1) rasa aman (*security*), (2) kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), dan (4) identitas (*identity*).

Menurut Drewnoski (1974) dalam (Bintarto, 1989), konsep kesejahteraan terdiri dari tiga komponen: pertama, melihat tingkat perkembangan fisik seseorang (somatic status), yang mencakup nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya; kedua, melihat tingkat perkembangan mental seseorang (mental/educational status), yang mencakup pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; dan ketiga, melihat integrasi sosial dan kedudukan sosialnya. Kesejahteraan sosial secara definitif merupakan kondisi atau keadaan sejahtera yang mencakup sejahtera fisik, mental, dan sosial, serta perbaikan terhadap penyakit sosial tertentu (Nursiah Chalid & Yusbar Yusuf, 2014). Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah ketika kebutuhan material, spiritual, dan sosial seseorang terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut (Suharto, 2006), kesejahteraan sosial sedikitnya mengandung empat makna, antara lain;

1. Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi sejahtera. Dalam pengertian ini, istilah "kesejahteraan sosial" didefinisikan sebagai kondisi

terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. Midgley menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai kondisi atau keadaan kesejahteraan manusia. Kondisi sejahtera adalah ketika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar mereka akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi dan mereka dilindungi dari ancaman utama yang mengancam kehidupan mereka.

2. Kesejahteraan sosial sebagai pelayanan sosial: Pelayanan sosial biasanya terdiri dari lima bentuk: jaminan sosial (jaminan sosial), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal. Kesejahteraan sosial sebagai tunjangan sosial, khususnya diberikan kepada orang miskin.
3. Kesejahteraan sosial sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menyelenggarakan pelayanan sosial.

Kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga, struktur kegiatan ekonomi sektoral, potensi regional (sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur), dan kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan produksi dan pemasaran di berbagai skala adalah beberapa faktor yang dapat membantu kita memahami realitas kesejahteraan (Tangkilisan, H. N. S, 2003). Peningkatan kualitas hidup manusia dan pembangunan membutuhkan kebijakan atau pedoman. Tujuan dari kebijakan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Midgley & Livermore, 2009). Kesejahteraan sosial adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, kesehatan, dan rekreasi masyarakat (Zastrow, 2010). Ada dua cara untuk melihat kebijakan sosial pemerintah. Yang pertama mencakup program pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan layanan personal (Deacon, 2002). Yang kedua mencakup kebijakan kesejahteraan sosial yang berdampak pada kualitas hidup manusia (Di Nitto, 2003). Bantuan publik, asuransi sosial, layanan sosial, dan masalah yang memengaruhi layanan kesejahteraan sosial adalah bagian dari upaya pemerintah ini. Jamrozik (2001) mengatakan bahwa kebijakan sosial terdiri dari tiga tingkat: politik, administratif, dan operasional. Dalam tingkat politik,

perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan, dan dalam tingkat administratif, kebijakan ditafsirkan menjadi kegiatan operasional. Di tingkat operasional, masyarakat menerima pelayanan sosial secara langsung. (Blackmore dan Griggs, 2007) mendukung pendapat ini dengan mengatakan bahwa meskipun kebijakan sosial seringkali menghadapi kesulitan, tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memenuhi kebutuhan individu. Dalam kebijakan sosial, penerapan nilai keadilan sosial sangat kuat.

Belanja Bantuan Sosial menjadi salah satu pos atau bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Pengertian Belanja Bantuan Sosial tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Pusat/Daerah berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan meningkatkan kemampuan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial yang dimaksud adalah peristiwa atau kejadian yang dapat memicu potensi kesenjangan sosial yang ditanggung oleh individu, kelompok, maupun masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis ekonomi, serta bencana alam. Risiko sosial ini akan menyebabkan masyarakat tidak

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (Dharmakarja, 2017). Bantuan sosial diberikan oleh pemerintah dalam bentuk barang, jasa dan uang untuk melindungi masyarakat tidak mampu dari potensi resiko sosial serta untuk meningkatkan taraf

hidup mereka. (Alamanda, 2020) Perluasan bantuan sosial yang terus bergulir sampai saat ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan (Fadhli & Nazila, 2023).

2.4 Tinjauan Empiris

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No | Judul, Peneliti dan Tahun | Metode dan Variabel | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---|
| 1 | <p>Analisis Dampak Globalisasi, Kebijakan Fiskal, Dan Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif : Studi Kasus Dengan Data Panel Pada 9 Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>Rezaneri Noer Fitrianasari</p> <p>Tahun 2021</p> | <p>Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data</p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 2. Realisasi Penanaman Modal Asing 3. Persentase Pengeluaran Fungsi Kesehatan 4. Persentase Pengeluaran Fungsi Pendidikan 5. Indeks Pembangunan Manusia | <p>Hasil temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif di Kalimantan Timur beserta 9 kabupaten/kota (kecuali Mahakam Hulu) termasuk kategori memuaskan. Variabel penanaman modal asing (PMA), keterbukaan perdagangan, persentase pengeluaran kesehatan, persentase pengeluaran pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Provinsi Kalimantan Timur.</p> |
| 2 | <p>Analisis Dampak Kebijakan Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020</p> <p>Rezaneri Noer</p> | <p>Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data</p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 2. persentase pengeluaran pendidikan 3. Indeks Kemandirian | <p>Nilai Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, diperoleh hasil bahwa terdapat empat wilayah dengan nilai IPEI di atas rata-rata Pulau Sumatra, yaitu Provinsi Sumatera Utara,</p> |

| No | Judul, Peneliti dan Tahun | Metode dan Variabel | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---|
| | <p>Fitrianasari, Khusnul Chotimah .Ovilia Vebi Arnida</p> <p>Tahun 2022</p> | <p>Fiskal Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. tingkat inflasi 5. tingkat keterbukaan ekonomi 6. Pembentukan Modal Tetap Bruto | <p>Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Serta, terdapat enam wilayah dengan kriteria nilai IPEI di bawah rata-rata Pulau Sumatra, yaitu Provinsi Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Persentase pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, inflasi, keterbukaan ekonomi, dan pembentukan modal tetap bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Pulau Sumatra.</p> |
| 3 | <p>Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia</p> <p>Silvi Dewi Purwanti, Farida Rahmawati</p> <p>Tahun 2021</p> | <p>Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data</p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 2. Belanja Pendidikan 3. Belanja Kesehatan 4. Tingkat Pengangguran Terbuka | <p>pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, adapun kebijakan di bidang pendidikan oleh pemerintah selama periode pengamatan seperti perbaikan sistem pendidikan yang lebih modern, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, dll, namun pengaruh dari hasil berbanding terbalik. Variabel pengeluaran</p> |

| No | Judul, Peneliti dan Tahun | Metode dan Variabel | Hasil Penelitian |
|----|---|--|--|
| | | | <p>pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Sehingga variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan merupakan faktor pendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia, namun melalui pengeluaran pemerintah bidang pendidikan belum maksimal hasil yang dicapai.</p> |
| 4 | <p>Inclusive Growth and Its Determinants Recent Evidence from Indonesia with Provincial Data</p> <p>Desi Listyo Rini , Tulus Tahi Hamonangan Tambunan</p> <p>Tahun 2021</p> | <p>Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data</p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 2. Komponen Kesehatan dan pendidikan 3. Komponen Permodalan 4. Komponen Teknologi 5. Komponen Akses kepada Market | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya inklusif. Hanya beberapa provinsi yang mencapai pembangunan inklusif. Ditemukan bahwa akses teknologi yang diwakili oleh persentase rumah tangga yang memiliki komputer dan akses energi yang diwakili oleh persentase rumah tangga yang</p> |

| No | Judul, Peneliti dan Tahun | Metode dan Variabel | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|
| | | 6. Komponen akses kepada rumah tangga 7. Infrastruktur 8. Akses kepada Energi | menggunakan LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak berpengaruh positif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. |
| 5 | analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif jawa timur Meilissa Ike Dien Safitri, Candra Fajri Ananda, Ferry Prasetyia Tahun 2021 | Metode: Panel Vector Correction Model (PVECM), Panel data Variabel: 1. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 2. Rasio realisasi belanja pemerintah fungsi pendidikan dengan jumlapenduduk 3. Rasio realisasi belanja pemerintah fungsi kesehatan dengan jumlapenduduk 4. Rasio realisasi belanja pemerintah fungsi ekonomi dengan jumlah penduduk 5. Tingkat Pengangguran Terbuka 6. PDRB per kapita | Hasil penelitian menunjukkan jika belanja fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada jangka panjang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif. Pada jangka pendek, belanja fungsi kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, akan tetapi belanja fungsi ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Kontribusi belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan |

| No | Judul, Peneliti dan Tahun | Metode dan Variabel | Hasil Penelitian |
|----|---|--|---|
| | | | ekonomi inklusif yaitu sebesar 47%, sehingga temuan kami mengindikasikan adanya peran dari faktor lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Jawa Timur, salah satunya yaitu kualitas sumber daya manusia atau dikenal sebagai modal manusia (human capital). |
| 6 | <p>The Effect of Aceh Government Spending Policy on Inclusive Growth: Income per Capita as a Mediating Variable</p> <p>M. Eka Saputra, Teuku Zulham * and Srinita Srinita</p> <p>Tahun 2025</p> | <p>Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data</p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan inklusif (IPEI) 2. Belanja Bantuan Sosial 3. Belanja modal 4. Belanja Hibah 5. Pendapatan Perkapita | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja bantuan sosial berdampak positif terhadap pembangunan inklusif, sedangkan belanja hibah dan pendapatan per kapita berpengaruh positif. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan per kapita memediasi dampak belanja modal terhadap pembangunan inklusif tetapi tidak memediasi dampak belanja hibah atau bantuan sosial terhadap pembangunan inklusif. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan tata kelola, kebijakan penganggaran, dan belanja daerah secara lebih berkelanjutan dan</p> |

| No | Judul, Peneliti dan Tahun | Metode dan Variabel | Hasil Penelitian |
|----|--|--|--|
| | | | tepat sasaran untuk mendorong pembangunan inklusif dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat di Provinsi Aceh. |
| 7 | <p>Pembangunan inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya</p> <p>Azwar Tahun 2016</p> | <p>Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data</p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 2. Distribusi Pendapatan 3. Faktor Kesehatan 4. Belanja daerah 5. Pengangguran Terbuka 6. Pendidikan 7. Jumlah penduduk Miskin | <p>Hasil menunjukkan secara agregat provinsi Sulawesi selatan belum inklusif, dimana Faktor kesehatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pembangunan inklusif sedangkan variabel lain Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Jumlah penduduk Miskin memiliki pengaruh yang negative.</p> |
| 8 | <p>Pengaruh Modal Fisik dan Sumber Daya Manusia terhadap Indeks Inklusif di Indonesia</p> <p>Reza Rizki Ramadhan, Yaya Setiadi</p> <p>Tahun 2019</p> | <p>Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data</p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 2. penanaman modal asing dan dalam negeri 3. Pendkes adalah nilai belanja pemerintah 4. RLS adalah rata-rata lama sekolah 5. TPAK adalah tingkat partisipasi angkatan kerja | <p>Temuan menunjukkan bahwa pada periode 2011-2017, tingkat nilai indeks inklusivitas di Indonesia berada pada kategori sedang. Variabel pembangunan modal fisik berupa belanja modal pemerintah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap indeks inklusivitas di Indonesia, sedangkan nilai investasi modal swasta tidak berpengaruh signifikan. Variabel pengembangan</p> |

| No | Judul, Peneliti dan Tahun | Metode dan Variabel | Hasil Penelitian |
|----|--|---|---|
| | | <p>6. Keluhan sehat adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan sebulan terakhir.</p> | <p>sumber daya manusia berupa TPAK, RLS, dan keluhan kesehatan signifikan secara statistik untuk indeks inklusivitas di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks inklusivitas di Indonesia.</p> |
| 9 | <p>Analysis Of Inclusive Growth In Poverty, Unemployment And Income Inequality In West Sumatera Province: Panel Error Correction Model Approach</p> <p>Hasdi Aimon , Anggi Putri Kurniadi dan Muhammad Kanzu Satrio Tahun 2020</p> | <p>Metode: Error Correction Model (ECM), Panel data</p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Pengeluaran Pemerintah | <p>Pertama, hasil analisis untuk jangka panjang adalah bahwa pembangunan inklusif dalam kemiskinan secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh kesehatan, pendidikan, investasi dan pengeluaran pemerintah. Sementara itu, pembangunan inklusif dalam pengangguran dan ketimpangan pendapatan dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh kesehatan, pendidikan, investasi, dan belanja pemerintah. Kedua, hasil analisis untuk jangka pendek adalah investasi dan pengeluaran pemerintah mengganggu keseimbangan pembangunan inklusif dalam kemiskinan. Sementara itu, pendidikan dan investasi mengganggu</p> |

| No | Judul, Peneliti dan Tahun | Metode dan Variabel | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|
| | | | keseimbangan pembangunan inklusif dalam pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Ketiga, ada keseimbangan jangka panjang pada pembangunan inklusif dalam kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. |
| 10 | <p>Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Indeks Komposit Pembangunan inklusif Dan Faktor Yang Memengaruhinya</p> <p>Saputri Kusumaningrum dan Risni Julaeli Yuhan</p> <p>Tahun 2019</p> | <p>Metode: Ordinary Least Square (OLS), Panel Data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi inklusif 2. Pembentukan modal tetap bruto, 3. belanja perlindungan sosial 4. keterbukaan perdagangan. 5. rasio kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) | <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa ternyata belum ada provinsi di Indonesia yang memiliki capaian pembangunan inklusif berkategori unggul (nilai indeks: 8-10) selama tahun 2016. Sebagian besar provinsi di Indonesia mencapai pembangunan inklusif dengan kategori memuaskan (nilai indeks: 4-7) dan terdapat dua provinsi yang memiliki kategori tidak memuaskan (nilai indeks: < 4), yaitu Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan inklusif provinsi di Indonesia menggunakan analisis regresi linier berganda.</p> |

| No | Judul, Peneliti dan Tahun | Metode dan Variabel | Hasil Penelitian |
|----|---------------------------|---------------------|--|
| | | | Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembentukan modal tetap bruto, belanja perlindungan sosial, keterbukaan perdagangan, dan rasio kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap PDRB memengaruhi pembangunan inklusif. |

2.5 Kerangka Pemikiran

Pergeseran paradigma pemerintah Indonesia terlihat dari Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No.59 Tahun 2017 tentang Sustainable Development Goals (SDGs). Poin kedelapan dalam SDGs menargetkan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan yang disertai terciptanya lapangan kerja yang layak bagi semua (UNDP, 2017). Pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi tujuan ke-8 dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Point kedelapan juga menjelaskan Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (*Decent Work and Economic Growth*).

Pertumbuhan ekonomi biasa dan pertumbuhan ekonomi inklusif memiliki perbedaan yang signifikan dalam tujuan dan implementasinya. Pertumbuhan ekonomi biasa biasanya hanya berfokus pada peningkatan output ekonomi secara keseluruhan tanpa memperhatikan distribusi pendapatan dan kesenjangan sosial. Dalam kontras, pertumbuhan ekonomi inklusif memiliki tujuan yang lebih luas dan berfokus pada menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas dan berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan

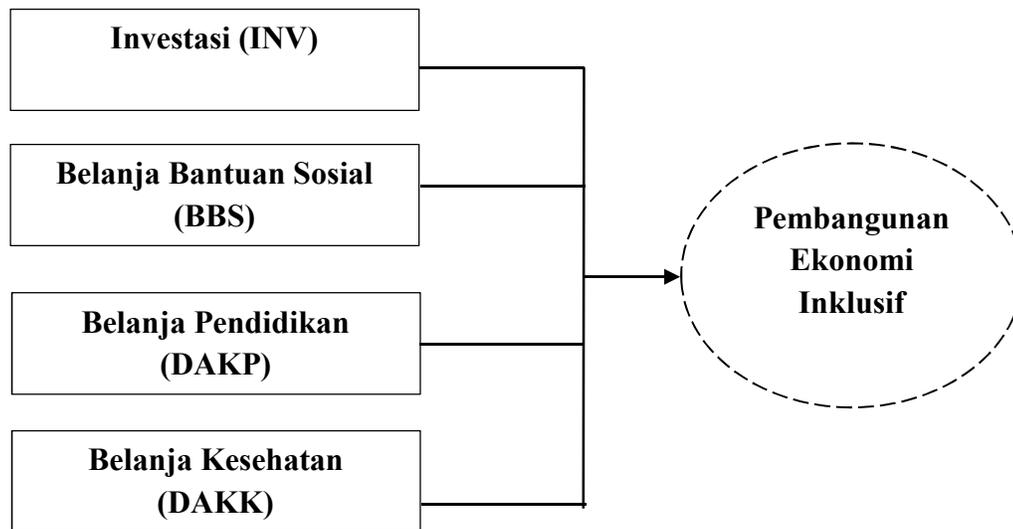
wilayah. Pertumbuhan ekonomi biasa dapat mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi jika tidak dilakukan dengan cara yang inklusif, maka kesenjangan sosial dan distribusi pendapatan tidak akan berubah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi inklusif memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan output, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan ekonomi bagi semua orang, termasuk mereka yang paling miskin dan terpinggirkan, (Besley, 2007). (Min Tang, 2008), (Kakwani, N. dan H. Son, 2008).

Investasi merupakan bagian output yang digunakan oleh perusahaan swasta untuk memberikan hasil dimasa mendatang. Menurut (Sukirno, 2000), aktivitas investasi yang dilaksanakan oleh masyarakat secara terus menerus sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi serta kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional serta taraf kemakmuran masyarakat yang menjelaskan bahwa untuk negara-negara berkembang, investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif baik dalam jangka pendek maupun panjang. (Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A, 2016), menyatakan Investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada negara berpendapatan menengah. (Anand, Mishra, dan Peiris, 2013), yang menyatakan investasi asing mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif pada negara emerging markets. (Ji Long dan Pasaribu, 2020), investasi terbukti memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. investasi yang dilakukan secara berkelanjutan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi mendorong pembangunan di berbagai wilayah, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

Peran kebijakan fiskal, khususnya melalui pengeluaran pemerintah di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Intervensi pemerintah melalui alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan merata di

berbagai lapisan sosial. Belanja yang lebih tinggi pada bidang kesehatan, investasi publik dan subsidi sosial untuk meningkatkan derajat inklusivitas. (Adedeji dkk, 2013), menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah elemen penting yang berkontribusi terhadap IG. Pendaftaran sekolah menengah dan kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan distribusi pendapatan. (Ervin Nora Susanti, Sartiyah, 2019), (Mhd. Rizki Syamsuri T, Agus Bandiyono , 2018) belanja fungsi pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif. Pada penelitian yang sama menunjukkan hasil bahwa fungsi Perlindungan Sosial juga memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan (Yunita Sihombing et al., 2022)

Meilissa Ike Dien Safitri, (2021), menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada fungsi kesehatan dan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif yang diproksi dari indeks pembangunan ekonomi inklusif dalam jangka panjang dan pendek. Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang, dan negara menyadari pentingnya peran pendidikan dan kesehatan sebagai kekuatan penting dalam memajukan pembangunan ekonomi. Namun, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. (Kolawole, 2016) mempelajari hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pembangunan inklusif menemukan bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan, penggunaan sumber daya publik dan tingkat pertumbuhan PDB riil memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembangunan inklusif, bentuk pengeluaran redistribusi kesehatan dan pendidikan mendorong pembangunan inklusif. maka kajian ini melihat perkembangan beberapa variabel terhadap pembangunan inklusif, yaitu tingkat pengangguran terbuka, belanja bantuan sosial, belanja fungsi pendidikan dan belanja fungsi kesehatan, dan terbentuk sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 8. Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis Penelitian

Sebagai jawaban sementara dari penelitian ini yang mengacu pada rumusan masalah dan teori maka dapat dijelaskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga Investasi (INV) berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif di 10 Provinsi Pulau Sumatra.
2. Diduga Belanja Bantuan Sosial (BBS) berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif di 10 Provinsi Pulau Sumatra.
3. Diduga Belanja Pendidikan (DAKP) berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif di 10 Provinsi Pulau Sumatra.
4. Diduga Belanja Kesehatan (DAKK) berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif di 10 Provinsi Pulau Sumatra.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Sumber data, Variabel Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif melakukan analisis pada masalah berdasarkan data-data menyajikan dan menginterpretasikannya. Data yang digunakan adalah data skunder, data ini diperoleh secara tidak langsung dari berbagai publikasi-publikasi, terbitan-terbitan platform resmi data dan terbitan-terbitan berbagai buku kumpulan data. Penelitian ini menggunakan Data Panel gabungan dari sebuah data antara runtun waktu dan observasi wilayah, dimana runtun waktu (*time series*) yang digunakan pada penelitian ini pada periode 2019-2023, dengan menggunakan observasi wilayah atau (*cross section*) 10 Provinsi di Pulau Sumatera meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada setiap terbitan 10 Provinsi di Sumatera dan Badan perencanaan pembangunan nasional (BAPPENAS) serta hasil publikasi lainnya, Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. Nama Variabel, Simbol, Satuan, dan Sumber Data

| NO | Variabel | Simbol | Satuan | Sumber Data |
|----|------------------------------|--------|--------------|---|
| 1 | Pembangunan Ekonomi Inklusif | IPEI | Persen | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional http://inklusif.bappenas.go.id/data |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial | BS | Milliar (RP) | Direktorat jendral perimbangan keuangan https://djkp.kemenkeu.go.id/ |

| | | | | |
|---|--------------------|------|--------------|--|
| 3 | Investasi | INV | Milliar (RP) | Badan Pusat Statistik 10 Provinsi, website: https://www.bps.go.id/ |
| 4 | Belanja pendidikan | DAKP | Milliar (RP) | Direktorat jenderal perimbangan keuangan https://djk.kemenkeu.go.id/ |
| 5 | Belanja kesehatan | DAKK | Milliar (RP) | Direktorat jenderal perimbangan keuangan https://djk.kemenkeu.go.id/ |

3.1.2 Definisi Oprasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat dan tempat variabel bebas adapun batasan atau definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Indeks Pembangunan ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. IPEI mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pembangunan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. IPEI diukur dalam tiga kelompok. 1. Skala 1-3 kurang memuaskan 2. Skala 4-7 memuaskan 3. Skala 8-10 sangat memuaskan. Pembangunan Inklusif dalam satuan persen di 10 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2019-2023.

2. Belanja Bantuan Sosial (BBS)

Belanja bantuan sosial menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) merupakan jenis belanja pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat secara selektif dan tidak terus-menerus. Tujuannya adalah untuk melindungi dari risiko sosial seperti bencana, kemiskinan, atau ketidakmampuan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan melalui perlindungan dan pemberdayaan. Belanja ini termasuk dalam belanja tidak langsung dan harus dilaksanakan berdasarkan data yang valid serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Permendagri Nomor

77 Tahun 2020 dan PP Nomor 12 Tahun 2019. Belanja bantuan sosial yang digunakan dalam satuan miliar (RP) rupiah di 10 Provinsi pulau Sumatera tahun 2019-2023.

3. Investasi (INV)

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan dua bentuk investasi utama yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan inklusif. PMA berasal dari pihak asing dan membawa teknologi serta akses pasar global, sementara PMDN dilakukan oleh pelaku domestik dengan peran penting dalam menguatkan ekonomi lokal dan sektor UMKM. Keduanya mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta pemerataan pembangunan yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi yang digunakan dalam satuan persen di 10 Provinsi pulau Sumatera tahun 2019-2023.

4. Belanja Pendidikan (DAKP)

Belanja pendidikan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari belanja daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dana ini dialokasikan secara khusus kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Penggunaan DAK fisik dan nonfisik dalam fungsi pendidikan harus sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh kementerian terkait, serta dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Belanja fungsi pendidikan dari DAK juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan, seperti peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan, terutama di daerah yang masih tertinggal atau memiliki keterbatasan sumber daya. Belanja Fungsi Pendidikan yang digunakan dalam satuan miliar (RP) rupiah di 10 Provinsi pulau Sumatera tahun 2019-2023.

5. Belanja Kesehatan (DAKK)

Belanja Kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari belanja daerah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus di bidang kesehatan yang menjadi prioritas nasional. DAK Kesehatan terbagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik digunakan untuk membiayai pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium kesehatan, guna meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di daerah. Sementara itu, DAK Nonfisik, seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), digunakan untuk mendukung operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan, termasuk pelayanan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Belanja Fungsi kesehatan yang digunakan dalam satuan miliar (RP) rupiah di 10 Provinsi pulau Sumatera tahun 2019-2023.

3.2 Regresi Linier Berganda dengan Panel Data

Model ekonometrika yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh Model dan Alat Analisis Regresi Linier berganda (OLS) dengan panel data digunakan. Metode analisis yang dilakukan menggunakan data runtut waktu (*time series*) dari Tahun 2019-2023 dan data Cross section yang terdiri dari 10 Provinsi di Pulau Sumatera. Untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, maka digunakan model regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut :

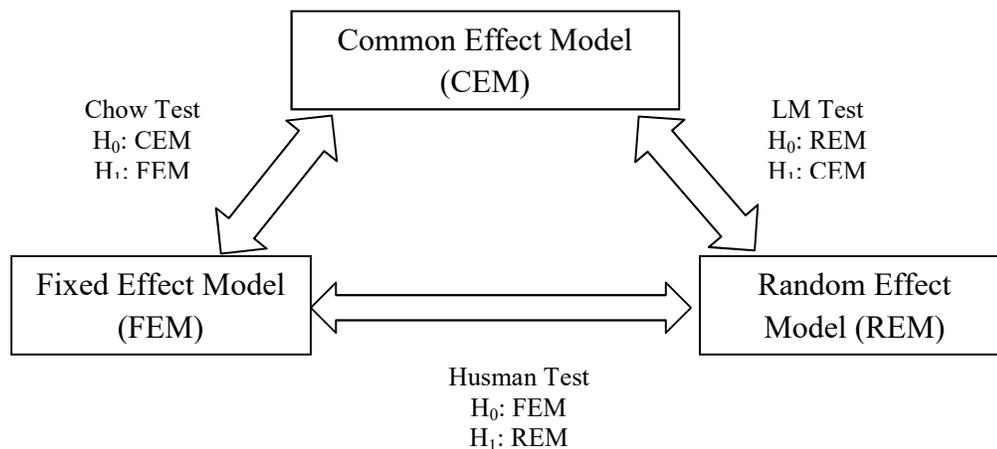
$$IPEI_{it} = \beta_0 + \beta_1 INV_{it} + \beta_2 BBS_{it} + \beta_3 DAKP_{it} + \beta_4 DAKK_{it} + \varepsilon_{it}$$

| | | |
|------|---|---|
| IPEI | = | Pembangunan Ekonomi Inklusif |
| BBS | = | Belanja bantuan sosial |
| INV | = | Investasi |
| DAKP | = | Belanja Pendidikan |
| DAKK | = | Belanja Kesehatan |
| i | = | Observasi 10 Provinsi (<i>Cross section</i>) |
| t | = | Periode penelitian Tahun 2019-2023 (<i>time Series</i>) |

- β_0 = Koefisien Konstanta intersep yang merupakan skalar
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi atau slop kemiringan dari masing-masing variabel
 β_4
 et = Standar error pada model matematis, (*Error Term*)

3.2.1 Pemilihan Model Data Panel

Pada dasarnya terdapat empat model yang digunakan dalam analisis data panel, yaitu *pooled least square*, *pooling independent cross sections over times*, *least square dummy variable (fixed effects)*, dan *random effects*. Ketiga model tersebut dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut :



Gambar 9. Pemilihan Model Data Panel

1. Pooled Least Square (PLS)

Pada model ini diasumsikan bahwa semua koefisien konstan untuk semua silang tempat dan titik-titik waktu. Bentuk model umumnya adalah sebagai berikut :

$$y_{it} = a + X_{it}\beta + U_{it} \quad i=1,\dots,N \quad t=1,\dots,T,$$

dimana i adalah negara, perusahaan, dan lain-lain dan t adalah waktu. Asumsi dari model di atas adalah intersep semuanya sama dan slope koefisien variabel X identik untuk semua tempat.

a. Pooling Cross Sections over Time

Model ini merupakan model *Pooled least square* dengan menambah variabel dummy. Bentuk modelnya adalah sebagai berikut :

$$y_{it} = a + X_{it}\beta + D_{time}U_{it} \quad i=1,\dots,N \quad t=1,\dots,T,$$

D_{time} menunjukkan variabel dummy waktu yang biasanya dimulai dari urutan waktu yang kedua misalnya tahun kedua dan tahun pertama sebagai dasar (a).

2. Uji Chow /Fixed Effect

Uji chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effect* (FE) lebih baik daripada model regresi data panel *common effect* (CE) dengan melihat *residual sum squares*. Pendekatan ini digunakan untuk memperbaiki LSDV dimana unit cross section yang besar tidak akan mengurangi derajat kebebasan. Pendekatan *Fixed effect* ini mengizinkan adanya intersep yang berbeda antar individu namun intersep setiap individu tidak bervariasi sepanjang waktu. Pendekatan ini ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

Dimana β_{0i} merupakan *intersep* dan β_1, β_2 merupakan *slope*. Adanya perbedaan intersep pada setiap unit cross section dilakukan dengan penambahan *subscript i*. Meskipun intersep berbeda antar negara namun intersep masing-masing negara tidak berbeda antar waktu, yang disebut *time invariant*. Untuk menentukan pendekatan yang lebih baik antara *Pooled Least Squared/PLS* dan *Fixed Effect Model* (FEM) digunakan Uji Chow dengan hipotesis sebagai berikut:

- 1) H_0 : *Pooled Least Square* (PLS)
- 2) H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar ($>$) dari F tabel maka H_0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya jika F hitung lebih kecil ($<$) dari F tabel maka H_0 diterima dengan model yang digunakkan adalah *Pooled*

Least Square (Widarjono, 2009) Perhitungan F Statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 2005):

$$F_{hitung} = \frac{\frac{SSE_1 - SSE_2}{(n-1)}}{\frac{SSE_2}{(nt-n-k)}} \sim F_{\alpha (N-1, NT - N - K)}$$

Dimana SSE_1 merupakan *Sum Square Error* dari model *Pooled Least Squared*, SSE_2 merupakan *Sum Square Error* dari model *Fixed Effect Model*, n merupakan jumlah *cross section* negara), nt merupakan jumlah *cross section* dikalikan jumlah *time series*, k jumlah variabel bebas. Sedangkan F tabel didapat dari:

$$F\text{-tabel} = \{ : df(n-1, nt-n-k) \}$$

Dimana α merupakan tingkat signifikansi yang dipakai (alfa), n merupakan jumlah negara (*cross section*), nt merupakan jumlah *cross section* dikali jumlah *time series*, k merupakan jumlah variabel bebas

3. Uji Hausman / Random Effect

Untuk menentukan metode apa yang sebaiknya dipakai antara *fixed effect* atau *random effect*, digunakan metode yang dikembangkan oleh Hausman. Uji Hausman ini didasarkan bahwa penggunaan variabel *dummy* dalam metode *fixed effect* dan *GLS* adalah efisien sedangkan *OLS* tidak efisien, di lain pihak alternatifnya adalah metode *OLS* efisien dan metode *GLS* tidak efisien. Karena uji hipotesis nolnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga Uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan df sebesar k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed effect* dan sebaliknya. Secara matematis, uji ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$W = (\beta_{fe} - \beta_{re})^1 [V(\beta_{fe}) - V(\beta_{re})]^{-1} (\beta_{fe} - \beta_{re}) \sim \chi^2(k) W$$

Estimasi dari matriks kovarian sebenarnya β_{fe} = estimator dari FEM β_{re} = estimator dari REM. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan *degree of freedom* (df) sebesar k di mana k adalah jumlah variabel independen perbandingan tersebut dilakukan dalam kerangka hipotesis sebagai berikut:

- 1) $H_0 : E(\tau_{x_{it}}) = 0$; maka *Random Effect Model* (REM) adalah model yang tepat
- 2) $H_1 : E(\tau_{x_{it}}) \neq 0$; maka *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang tepat

Pendekatan spesifikasi Hausman mengikuti distribusi Chi-Squared. Dalam Chi-Squared_{hitung} > Chi-Squared_{tabel} dan p-value signifikan maka H_0 ditolak sehingga pendekatan FEM lebih tepat digunakan

4. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik daripada metode *common effect* maka digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Hipotesis dari LM Test adalah:

H_0 : *Common effect*

H_a : *Random Effect*

Untuk melakukannya diperlukan formulasi sebagai berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n [\sum_{t=1}^n e_{it}]^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^n e^2_{it}} - 1 \right]^2 \quad \text{Jumlah dari kuadrat jumlah residual}$$

$$\sum_{i=1}^n [\sum_{t=1}^n e_{it}]^2$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^n e^2_{it} \quad \text{Sum Squared of Residual dari random effect}$$

n= Jumlah individu data

t= Jumlah tahun data

Nilai LM kemudian dibandingkan dengan nilai *chi-squares* pada *degree of freedom* (df) sebanyak jumlah variabel independen dan $\alpha = 1\%$ dan $\alpha = 5\%$. Perbandingan tersebut dilakukan dalam kerangka hipotesis sebagai berikut:

- 1) H_0 = menggunakan model PLS, jika nilai $LM < \text{nilai } chi\text{-squares}$
- 2) H_1 = menggunakan REM, jika nilai $LM > \text{nilai } chi\text{-squares}$

3.3 Pengujian Asumsi Klasik

3.3.1 Deteksi Multikolinearitas

Adanya dua asumsi penting tentang variabel gangguan yang akan memengaruhi sifat estimator yang BLUE. Pertama, varian dari variabel gangguan adalah tetap atau konstan (homokedastisitas). Kedua, tidak adanya korelasi atau hubungan antara variabel gangguan satu observasi dengan variabel gangguan observasi yang lain atau sering disebut tidak ada masalah autokorelasi (Widarjono, 2013). Pendeteksian terhadap multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance – Inflating Factor* (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai $VIF > 10$ maka terdapat gejala multikolinieritas yang tinggi (Sanusi, 2014). Kecepatan dari meningkatnya varians atau kovarians dapat dilihat dengan *Variance Inflation Factor* (VIF), yang didefinisikan sebagai :

$$VIF = \frac{1}{(1 - R^2)}$$

Seiring dengan R^2 mendekati 1, VIF mendekati tidak terhingga. Hal tersebut menunjukkan sebagaimana jangkauan kolinieritas meningkat, varian dari sebuah estimator juga meningkat, dan pada suatu nilai batas dapat menjadi tidak terhingga (Gujarati, 2010).

- 1) H_0 : $VIF > 10$, terdapat multikolinearitas antar variabel bebas
- 2) H_a : $VIF < 10$, tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas

3.3.2 Uji Heterokedastisitas

Widarjono (2013) Suatu model yang terbebas dari heteroskedastisitas berarti variansi dari *error* bersifat konstan (tetap) atau dapat dikatakan homoskedastis. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan uji *White*. Model dikatakan mengandung heteroskedastisitas jika statistik *white* ($n \times R^2$) lebih besar dari χ^2 tabel.

Cara lainnya adalah dengan menggunakan metode *GLS Weight Cross-section* yang tersedia dalam estimasi output program *EViews*. Nilai *Sum Square Resid (SSR) Weighted* dibandingkan dengan *Sum Square Resid (SSR) Unweighted*. Jika $SSR\ weighted < SSR\ Unweighted$ maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari masalah heteroskedastisitas

3.3.3 Uji Autokorelasi

Widarjono (2013), salah satu asumsi penting dalam metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan lain. Sedangkan autokorelasi merupakan adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antar satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Jadi dengan adanya autokorelasi, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) hanya *Linear Unbiased Estimator* (LUE). Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi yaitu melalui metode *Durbin-Watson*, Metode *Breusch-Godfrey*.

3.4 Uji Hipotesis t dan F statistik

3.4.1 Uji t (*t-test*)

Uji t-Statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Digunakan uji 1 arah dengan tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat $\alpha = 0,05$. Hipotesis pengujian sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial

Ho: $\beta_1 = 0$: Diduga belanja bantuan sosial tidak berpengaruh positif terhadap pembangunan Ekonomi inklusif.

Ha : $\beta_1 > 0$: Diduga belanja bantuan sosial berpengaruh positif terhadap pembangunan Ekonomi inklusif.

2. Investasi

Ho: $\beta_2 = 0$: Diduga investasi tidak berpengaruh positif terhadap pembangunan Ekonomi inklusif.

Ha : $\beta_2 > 0$: Diduga investasi berpengaruh positif terhadap pembangunan Ekonomi inklusif.

3. Belanja Pendidikan

Ho: $\beta_3 = 0$: Diduga belanja pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap pembangunan Ekonomi inklusif.

Ha : $\beta_3 > 0$: Diduga belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap pembangunan Ekonomi inklusif.

4. Belanja Kesehatan

Ho: $\beta_4 = 0$: Diduga belanja kesehatan tidak berpengaruh positif terhadap pembangunan Ekonomi inklusif

Ha : $\beta_4 > 0$: Diduga belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap pembangunan Ekonomi inklusif.

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai t-hitung $>$ nilai t-tabel maka H_0 ditolak atau menerima H_a , artinya variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat.
- 2) Jika nilai t-hitung $<$ nilai t-tabel maka H_0 diterima atau menolak H_a , artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

3.4.2 Uji F-Statistik

Uji F-Statistik digunakan untuk membuktikan apakah variabel bebas yang digunakan dalam penelitian secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel terikat. Nilai F-Statistik yang besar lebih baik dibandingkan nilai F-Statistik yang kecil. Nilai *Probability* (F-Statistik) merupakan tingkat signifikansi marginal dari F-Statistik, dengan hipotesis pengujian sebagai berikut:

$H_0: \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = 0$, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel belanja bantuan sosial (BS), investasi (INV), belanja pendidikan (DAKP) dan belanja kesehatan (DAKK) terhadap Pembangunan Ekonomi inklusif (IPEI).

$H_0: \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \neq 0$, artinya ada pengaruh signifikan antara variabel belanja bantuan sosial (BBS), investasi (INV), belanja pendidikan (DAKP) dan belanja kesehatan (DAKK) terhadap Pembangunan Ekonomi inklusif (IPEI).

1) Jika $F_{Hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima

2) Jika $F_{Hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima, dan H_a ditolak

Pada tingkat $\alpha = 0,05$ jika H_0 ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jika H_0 diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada $\alpha = 0,05$.

3.5 Individual Effect

Individual effect Dalam Widarjono (2013), merupakan nilai individu masing-masing cross-section yang di dapat dari *Fixed Effect model* rumus *individual effect* yaitu :

$$C_i = C + \beta$$

Dimana :

C_i = Individual Effect

C = konstanta

β = koefisien dari masing-masing Crossection

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Bedasarkan rumusan masalah penelitian yang diajukan, dan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera tentang pengaruh variable Investasi (INV), Belanja Bantuan Sosial (BBS), Belanja Pendidikan (DAKP) dan Belanja Kesehatan (DAKK) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu pembangunan inklusif (IPEI). serta pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa investasi (INV) memiliki pengaruh positif dan signifikan, apabila investasi mengalami kenaikan sebesar 1 miliar rupiah maka pembangunan inklusif (IPEI) akan meningkat sebesar 5,23% pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera, dengan asumsi variable lain dalam keadaan konstan.
2. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial berasal dari DAK (BBS) memiliki pengaruh positif dan signifikan, apabila belanja bantuan sosial mengalami kenaikan sebesar 1 miliar rupiah maka pembangunan inklusif (IPEI) akan meningkat sebesar 0,56% pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera, dengan asumsi variable lain dalam keadaan konstan.
3. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa belanja pendidikan (DAKP) memiliki pengaruh positif dan signifikan, apabila belanja fungsi pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1 miliar rupiah maka pembangunan inklusif (IPEI) akan

meningkat sebesar 0,14% pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera, dengan asumsi variable lain dalam keadaan konstan.

4. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa belanja kesehatan (DAKK) tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

5.2 Saran dan Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Investasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembangunan inklusif di Provinsi-provinsi Pulau Sumatera. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan investasi dengan cara memberikan insentif fiskal serta mempercepat proses perizinan, terutama untuk sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, pengembangan infrastruktur dasar dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menjadi strategi penting guna menarik investor dan menciptakan dampak ekonomi yang luas serta merata.
2. Belanja bantuan sosial yang berasal dari DAK terbukti mendorong peningkatan inklusivitas pembangunan. Untuk itu, penyaluran bantuan perlu diarahkan secara tepat sasaran menggunakan sistem data terpadu yang akurat. Selain itu, bantuan sebaiknya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan ke program produktif seperti pelatihan kerja, bantuan usaha mikro, atau padat karya untuk mendorong kemandirian masyarakat miskin secara berkelanjutan.
3. Pengeluaran pemerintah dalam fungsi pendidikan berdampak signifikan terhadap pembangunan inklusif, sehingga kebijakan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan, khususnya pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Dukungan berupa beasiswa afirmatif dan penguatan lembaga pendidikan di wilayah tertinggal juga perlu dioptimalkan untuk memastikan pembangunan SDM yang merata di seluruh provinsi Sumatera.

4. Meski secara statistik tidak signifikan, belanja fungsi kesehatan tetap penting dalam mendukung inklusi jangka panjang. Pemerintah daerah dapat memfokuskan belanja kesehatan pada pemerataan akses layanan di wilayah terpencil melalui penyediaan fasilitas dasar dan tenaga medis, serta integrasi layanan kesehatan dengan program sosial untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adedeji, O. S., Du, H., & Afari, M. O. (2013). Inclusive growth: An application of the social opportunity function to selected African countries. IMF working paper No., 139
- Afriliana SN, (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Komparasi antar Provinsi di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies* 2022;1:44–57.
- Agus Widarjono. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia,. Jakarta.
- Alamanda. (2020). The effect of government expenditure on income inequality and poverty inIndonesia. *Info Artha*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.614>.
- Ali, I. (2007). Inequality and the Imperative for Inclusive Growth in Asia, *Asian Development Review*, Vol. 24 (2), pp. 1-16.
- Ali, I. And J. Zhuang. (2007). *Inklusif Growth toward a Prosperous Asia: Policy*
- Ali, I., & Son, H. H. (2007). *Defining and Measuring Inclusive Growth: Application to the Philippines*. Manila: Asian Development Bank.
- Ali, Ifzal dan Hyun Hwa Son. (2007). *Measuring Inclusive Growth*. *Asian Development Review* Vol. 24, No. 1, pp. 11–31. Manila: ADB.
- Ali, S., Shah, M., & Ali, S. (2015). Globalization and macroeconomic stability in Pakistan (1980-2010). *Global Advanced Research Journal of Management and Business Studies*, 4(9), 3633-72.
- Almutairi, N. (2020). The effects of oil price shocks on the macroeconomy: economic growth and unemployment in Saudi Arabia. *OPEC Energy Review*, 44(2), 181–204<https://doi.org/10.1111/opec.12179>.

- Ambarsari, I., & Purnomo, D. (2005). Studi tentang penanaman modal asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 26–27.
- Ambya, A. (2020). How government spending on public sector affects the economic growth? *Jejak*, 13(1), 218– 229. <https://doi.org/10.15294/jejak.v13i1.21943>.
- Anand, R., Mishra, S. and Peiris, S. (2013). Inclusive growth: measurement and determinants. IMF Working Papers No., 13/135.
- Anand, R., Mishra, S., & Peiris, S. J. (2013). *Inclusive Growth: Measurement and Determinants* (IMF Working Paper No. 13/135). International Monetary Fund.
- Anand, R., Tulin, V., & Kumar, N. (2014). *India : Defining and Explaining Inclusive Growth and Poverty Reduction*.
- Anggraeni, T., Fatmawati, I., & Hartono, D. (2023). Belanja Kesehatan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 25–38.
- Anis Rahmawati 1 , Layna Lutfiani 2 , Zulvita Rahma Yunia 3 , Isma'iddatur Rofiqoh Peer (2021). Dampak Pandemic Covid- 19 Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jawa Timur Indikator Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan. *Efektor*, Volume 8 Issue 1,2021, Pages 79-88 Available online at:<http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/efektor-e> DOI: <https://doi.org/10.29407/e.v8i1.15708>.
- Arisman, A., & Priyarsono, D. S. (2018). "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 112-127.
- Asian Development Bank. (2010). *Key Indicators for Asia and the Pacific*. Asian Development Bank : Mandaluyong City, Philippines.
- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.
- Azzahra, N., & Suseno, D. A. (2025). Pengaruh modal finansial, modal manusia serta teknologi terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 6(3), 399–407. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v6i3.6822>.
- Bappenas (2021). *Laporan Indeks Pembangunan Inklusif Indonesia 2021*. Kementerian PPN/Bappenas.

- Bailey, S. J. (1995). *Public sector economics: Theory, policy and practice*. London: Macmillan. [SpringerLink+1Amazon+1](#)
- Barrientos, A. (2007). “The role of tax-financed social security”, in *International Social Security Review*, Vol. 60, No. 2–3.
- Barrientos, A. (2019). “Conditional income transfers, social policy and development”, in J. Midgley, R. Surender and L. Alferts (eds), *Handbook of social policy and development* Cheltenham, Elgar.
- Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–443.
- Barro, R.J, (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries, *Journal of Economic Growth*, 5(1), 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1009850119329> .
- Barthos, B., & Mansoer, S. (2011). Analisis Ekonomi Politik dalam Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Implikasinya Terhadap Kinerja PJT II (Studi Kasus Jatiluhur). *JURNAL EKONOMI*, 13(2), 223–246.
- Bello, A.A., Renai, J., Hassan, A., Akadiri, S.S., & Itari, A.R. (2022). Synergy Effects of ICT Diffusion and Foreign Direct Investment on Inclsuive Growth in SubSaharan Africa. *Environmental Science and Pollution Research* 30, 9428-9444. <https://doi.org/10.1007/s11356-02222689-3>.
- Bintarto. (1989). *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Birdsall, Nancy. (2007). *Reflections on the Macro Foundations of the Middle Class in the Developing World*. Center for Global Development Working Paper 130, Washington DC.
- Blakemore, K., & Griggs, E. (2007). *Social policy: An introduction* (3rd ed.). Maidenhead: Open University Press. [Elgar Online](#)
- Bourguignon, F. (2003). The Poverty-Growth-Inequality Triangle. *Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) Working Paper* No. 125.
- Busse, M., & Groizard, J. L. (2006). *Foreign direct investment, regulations, and growth*. The World Bank.

- Cahyadi, Ni Made Ayu Krisna *et al.* (2018). Inclusive Growth and Leading Sector in Bali Province. *Economic Journal of Emerging Markets Vol. 10*. <http://journal.uii.ac.id/JEP/article/view/8220/8137>,
- Cammeraat, E. (2020). The relationship between different social expenditure schemes and poverty, inequality and economic growth. *International Social Security Review*, 73(2), 101–123. <https://doi.org/10.1111/issr.12236>.
- Can, M. (2009). Parameters of the Islamic Economic System. *Proceeding at the International Symposium on Sustainable Development*, 24–31.
- Castañeda, A. *et al.* (2018). “A new profile of the global poor”, in *World Development*, Vol. 101, January.
- Chadha V, Chadda I. (2020), Has Social Sector Development Catalysed the Inclusiveness of India’s Economic Growth? *The Indian Economic Journal* 2020;68:61–81. <https://doi.org/10.1177/0019466220959795>.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan upah minimum kabupaten/kota serta laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12. econeurasia.com+1Jurnal Unimed+1
- Claus, I., Vazquez, J.M., & Vulovic, V. (2012). Government fiscal policies and redistributions in Asian countries. *ADB Economics Working Paper Series*, No.3, 10 October 2012. Filipina: Asian Development Bank.
- David, M. A., & Petri, M. M. (2013). Inclusive growth and the incidence of fiscal policy in Mauritius: Much progress, but more could be done (No. 13-116). *International Monetary Fund*.
- Deacon, B. (2002). *Global social policy: International organizations and the future of welfare*. London: SAGE Publications.
- DESA, U. (2018). *Promoting inclusion through social protection: Report on the world social situation 2018*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Dharmakarja, I. G. M. A. (2017). Rekonstruksi belanja bantuan sosial. 1, 374–389.
- DiNitto, D. M. (2003). *Social welfare: Politics and public policy* (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon. [ResearchGate](https://www.researchgate.net/publication/311111111)

- Dixit, R., & Ghosh, M. (2013). Financial Inclusion for Inclusive Growth of India - A Study of Indian States. *International Journal of Business Management & Research (IJBMR)*, 3(1), 147–156. https://www.academia.edu/9752232/FINANCIAL_INCLUSION_FOR_INCLUSIVE_GROWTH_OF_INDIA_A_STUDY_OF_INDIAN_STATES
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195–225.
- Drewnowski, J. (1974). On measuring and planning the quality of life. The Hague: Mouton. [EconStor+ISAGE Journals+1](#)
- Estrada, G., Lee, S. H., & Park, D. H. (2014). Fiscal policy for inclusive growth: An overview. ADB Economics Working Paper Series No.424, December 2014. Filipina: Asian Development Bank.
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh implementasi bantuan sosial BPNT dan PKH terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 196–202. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654>.
- Farhan, M. H. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial dan Akses Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia (Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). Retrieved from <https://repository.ar-raniry.ac.id/31076/1/Muhammad%20Hafidh%20Farhan%2C%20211008004%2C%20PASCA%2C%20ES.pd>
- Febiyansah, P.T. (2017). Indonesia's FDI Exports-GDP Growth Nexus: Trade or Investment-Driven?. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 19(4), 470-488. <https://doi.org/10.21098/bemp.v19i4.696>.
- Goshen, Z., & Levit, D. (2022). Agents of inequality: common ownership and the decline of the American worker. *Duke Law Journal*, 72(1). <https://files.epi.org/2012/ib342-unions-inequality>.
- Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. (2001). Public Spending on Health Care and the Poor. IMF Working Paper No. WP/01/127. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Han, de Arjan and Throat, S. (2013). "Inclusive Growth: More than Safety Nets" – IDRC/CRDI SIG Working Paper
- Hapsari, S. A. D., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2013). Pertumbuhan Inklusif: Fenomena Pertumbuhan Inklusif Di Kawasan Indonesia Bagian Barat Dan

- Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 85–112. <https://doi.org/10.29244/jekp.2.2.85-112>.
- Hariyani, N., Trisnantari, N., & Fatmasari, E. Y. (2023). Determinants of the coverage of health insurance in West Sumatra Province, Indonesia. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*, 56(2), 123–130. <https://doi.org/10.3961/jpmph.23.056>
- Hausmann, R., D. Rodrik, and A. Velasco. 2005. *Growth Diagnostic*. Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
- Hayat, A. (2019). Foreign direct investments, institutional quality, and economic growth. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 28(5), 561-579.
- Hidayat, I., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2020). The Determinants of Inclusive Economic Growth in Yogyakarta. *Jurnal Economia* 16(2), 200-210. <https://doi.org/10.21831/economia.v16i2.29342>.
- Hutabarat, B. J., Ginting, R., & Marbun, P. P. (2023). The Effect of Non-Food Expenditure Per Capita, Education, and Health Manpower on the Human Development Index in Humbang Hasundutan District. *American Journal of Education and Learning*, 8(1), 1–9. <https://argaelpublisher.com/index.php/amjel/article/view/14>
- Ihwandi, L. R. & Khoirunurrofik. (2023). Regional Financial Performance and Inclusive Economic Development: Empirical Evidence From Provinces in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 417–429. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.417-429>.
- ILO, U., & UNDESA, W. (2012). *Macroeconomic stability, inclusive growth and employment*. Thematic Think Piece, UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda.
- Irfan, M. (2003). *Poverty and social safety nets: A case study of Pakistan (MIMAP technical paper series no. 15)*. Islamabad, Pakistan: Pakistan Institute of Development Economics (PIDE).
- Jamrozik, A. (2001). *Social policy in the post-welfare state: Australians on the threshold of the 21st century (2nd ed.)*. Frenchs Forest, NSW: Pearson Education Australia. [Open Library+2National Library of Australia+2National Library of Australia+2](#)

- Ji Long, T., & Pasaribu, E. (2020). Analisis Spasial Determinan Pertumbuhan Inklusif Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Seminar Nasional Official Statistics. Vol.2019(1) hal.416–423.
- Kakwani, N. dan H. Son. (2008). Poverty Equivalent Growth Rate. *Review of Income and Wealth* 54(4): 643–655.
- Kang, H. & Vazquez, J.M. (2021). When Does Foreign Direct Investment Lead to Inclusive Growth? *The World Economy* 45(8), 2394-2427. <https://doi.org/10.1111/twec.13236>.
- Keçili, M. Ç., & Ethem, E. S. E. N. (2020). The Relationship between Educational Expenditure and Economic Growth: The Case of Turkey. *Equinox Journal of Economics Business and Political Studies*, 7(2), 114-126.
- Khan et al. (2016). Measurement and Determinants of Inclusive Growth: A Case Study of Pakistan (1990-2012). *The Pakistan Development Review*. 55(4), 455-466. <https://doi.org/10.30541/v55i4I-IIpp.455-466>.
- Klasen, S. (2017) ‘Measuring and monitoring inclusive growth in developing and advanced economies: Multiple definitions, open questions and some constructive proposals’, *Reframing Global Social Policy: Social Investment for Sustainable and Inclusive Growth*, (12), pp. 123–144. Available at: <https://doi.org/10.56687/9781447332503-010>.
- Klasen, S. (2017). Measuring and monitoring inclusive growth in developing and advanced economies: Multiple definitions, open questions and some constructive proposals. *ADB Sustainable Development Working Paper Series*, 12, 123–144. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447332497.003.0006>
- Klasen, Stephen. (2010). *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*. ADB Sustainable Development Working Paper Series.
- Kolawole BO (2016). Government Spending and Inclusive-Growth Relationship in Nigeria: An Empirical Investigation. *Zagreb Int Rev Econ Business.*;19(2):33–56. doi: 10.1515/zireb-2016-0007.
- Kolawole, B. O. (2016). Government spending and inclusive-growth relationship in Nigeria: An empirical investigation. *Zagreb International Review of Economics and Business*, 19(2), 33–56. <https://doi.org/10.1515/zireb-2016-0007>

- Kristyanto, V. S., & Kaluge, D. (2018). Peningkatan Inklusivitas Ekonomi Melalui Pembiayaan Investasi Modal Manusia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 170. <https://doi.org/10.24843/jekt.2018.v11.i02.p04>.
- Krugman, P. (1991). *Geography and trade*. MIT Press.
- Kuncoro, Murdrajat. (2006). “Ekonomi Pembangunan”, Penerbit Salemba. Empat, Jakarta.
- Kuncoro, M. (2020). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN.
- Mangkoesoebroto, G. (1993). *Ekonomi publik (Edisi ke-3)*. Yogyakarta: BPFE. [OneSearch+5Pusat Sumber Belajar FEB UI+5Digital Library FEB+5](#)
- Mangkoesoebroto, G. (1998). *Teori ekonomi makro*. STIE YKPN.
- Mangkoesoebroto, G. (2002). *Public economy*. Yogyakarta: BPFE
- Mankiw, N. G. (2003). *Macroeconomics (5th ed.)*. New York: Worth Publishers.
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Teori Makro Ekonomi*, Jakarta : Erlangga.
- Maryam, S., & Irwan, M. (2022). *Pengantar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif*. Mataram: Mataram University Press.
- Masron, T. A., & Abdullah, H. (2010). Institutional quality as a determinant for FDI inflows: evidence from ASEAN. *World Journal of Management*, 2(3), 115-128.
- Mathers, N. & Slater, R. (2014). *Social protection and growth: Research synthesis*. Australia: Department of Foreign Affairs and Trade Australian Government.
- McKinley, T. (2010). *Inclusive growth criteria and indicators: An inclusive growth index for diagnosis of country progress*.
- Meilissa Ike Dien Safitri, Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). *Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur*. Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik.
- Midgley, J., & Livermore, M. (Eds.). (2009). *The handbook of social policy (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. [Google Books+3Google Books+3ResearchGate+3](#)

- Milanovic, B. (2016). *Global inequality: A new approach for the age of globalization*. Harvard University Press.
- Mokhov, V., Aliukov, S., Alabugin, A., & Osintsev, K. (2023). A Review of Mathematical Modes of Macroeconomics, Microeconomics, and Government Regulation of the Economy. *Mathematics* 11(14). <https://doi.org/10.3390/math11143246>.
- Murad, A. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Dikabupaten/Kota Di Ntb. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah-ALIANSI*, 3(2), 129-157.
- Nasikun. (1996). *Sistem sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Neil Lee, Paul Sissons. (2016), Inclusive growth? The relationship between economic growth and poverty in British cities. *Environment and Planning A* 2016, Vol. 48(11) 2317–2339 ! The Author(s) 2016 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0308518X16656000 epn.sagepub.com.
- Nunnenkamp, P., Schweickert, R., & Wiebelt, M. (2007). Distributional effects of FDI: how the interaction of FDI and economic policy affects poor households in Bolivia. *Development policy review*, 25(4), 429-450.
- Oktavia, T. (2020) ‘Analisis Pengaruh Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Serta Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi’, *Prosiding National Simposium & Conference Ahlimedia*, 1(1), pp. 139–146. Available at: <https://doi.org/10.47387/nasca.v1i1.26>.
- Osiobe, E. U. (2020). Human capital, capital stock formation, and economic growth: A panel ranger causality analysis. *Journal of Economics and Business*, 3(2).
- Pakasi, C. (2005). Dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara (Disertasi Doktor, Institut Pertanian Bogor). SciSpace
- Paramasivan, S. Mani, K. and Utpal, C. (2014). A Theoretical Model for Inclusive Economic Growth in Indian Context. *International Journal of Humanities and Social Science* 4(13), pp. 228-234
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.

- Prabowo DH, Maski G, Santoso DB,(2022). Fostering Inclusive Growth in Indonesia: Evidence from Panel Regression Analysis. *Journal of International Conference Proceedings* 2022;5:139–49. <https://doi.org/10.32535/jicp.v5i2.1680>.
- Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., & Bahagijo, S. (2012). *Pembangunan inklusif: prospek dan tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES : Prakarsa.
- Pratiwi, I. E., & Ismal, R. (2017). Analisis dampak kebijakan fiskal dan sasaran akhir kebijakan moneter terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia, Malaysia, Qatar dan Saudi Arabia. *Middle East and Islamic Studies*, 4(1).
- Primawan, M. (2020). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(1). Retrieved from <https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/download/1036/839/3486>.
- Ramirez, A., Ranis, G., & Stewart, F. (1998). Economic growth and human capital. QEH Working Paper Series, 18. [UMS Journals+1bircu-journal.com+1](https://www.umjournal.com/UMS-Journals/1bircu-journal.com/1)
- Ravallion, M. (2024). Inclusive Growth: A Review of Recent Evidence. *World Bank Policy Research Working Paper*, No. 12345.
- Raza, K., Majeed, S., & Islam, M. (2013). The impact of health indicators on economic growth in Pakistan. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(1), 11–27.
- Rezaneri Noer Fitrianasari, Khusnul Chotimah dan Ovilia Vebi Arnida,(2022) Analisis Dampak Kebijakan Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2015-2020. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 7 (1), Januari 2022 Dikirim: 10 Desember 2021; Diterima: 12 Desember 2021 ISSN: 2527-2772.
- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton & Company.
- Sadono Sukirno (2016). *Teori Pengantar Makroekonomi*. *Rajawali Press*
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(1), 45–60.

- Sajid, A., & Ali, A. (2018). Inclusive Growth and Macroeconomic Situations in South Asia: An Empirical Analysis. *Bulletin of Business and Economics (BBE)*, 7(3), 97-109.
- Santos, M., & Simões, M. (2021). Dimensions of globalisation and social welfare policies in Organisation for Economic Co-operation and Development countries. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 37(3), 195-210.
- Sari, M., Syechalad, M. N., & Majid, S. A. (2016). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*. Vol. 3(2) hal. 109–115.
- Sarwedi, S. (2002). Investasi asing langsung di Indonesia dan faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 17–35. <https://doi.org/10.9744/jak.4.1.pp.17-35>
- Satriawan, D., Putra, H. A., & Afandi, H. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Inklusif di Pulau Sumatera. *Journal of Social Research and Economics Transformation*, 4(1), 45–60. <https://jsret.knpub.com/index.php/jrest/article/view/701>.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sholihah, *et al* (2013). Pertumbuhan Inklusif : Faktor-Faktor yang Memengaruhi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Kelas Menengah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Vol. 02 No. 02*. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/viewFile/19947/13739>.
- Sihombing, P. R., & Purwanti, D. (2022). Dampak Investasi pada Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 123–135.
- Sijabat, R. (2022). Peran Belanja Pendidikan terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 10(2), 112–123.
- Silvi Dewi Purwanti, Farida Rahmawati (2021), Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia. *Ecoplan Vol. 4 No. 1, April 2021*, hlm 32-44. ISSN p: 2620-6102 e: 2615-5575.
- Singh, K. D. (2017). Inclusive Growth and Poverty Reduction: A Case Study of India, *Indian Journal of Public Administration*, 63(4), 579-594.

- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. W. W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). *The measurement of economic performance and social progress revisited*. Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
- Suharto, E. (2006). *Kebijakan sosial: Sebuah pengantar*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi modern: Perkembangan pemikiran dari klasik hingga Keynesian baru*. RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT. Raja. Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi, D. (2003). Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah: Rujukan bagi penetapan kebijakan pembiayaan pendidikan pada era otonomi dan manajemen berbasis sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya. [OneSearch+3Google Books+3Balai Yanpus+3](#)
- Suryanarayana, M.H. (2008). *Inclusive Growth: What is so exclusive about it?*. Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai.
- Susanti, E. N., & Sartiyah. (2019). Determinan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Dimensi*, 8(2), 249–265. [Academia+1E-Jurnal DPR+1](#)
- Suyatno. (2003). Hutang luar negeri, penanaman modal asing (PMA), ekspor, dan peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 1–15.
- Syamsuri, M. R., & Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi terhadap Peningkatan IPM dan Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Info Artha*, 2(1), 11–28.
- Tambunan, T. T. H. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan temuan empiris*. Ghalia Indonesia.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Manajemen publik*. Jakarta: Grasindo.
- Tanzi, V. (2000). *Globalization and the future of social protection*.
- Tju Ji Long, Ernawati Pasaribu, (2019), Analisis Spasial Determinan Pertumbuhan Inklusif Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. *Journal*

Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam Mendukung Implementasi SDG's.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development* (11th ed.). Boston: Addison-Wesley. [Amazon+4AbeBooks+4SCIRP+4](#)
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Boston: Pearson.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi* (Edisi kesembilan, Jilid 1). Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.
- Tulus, Tambunan, T.H. (2015). *Perekonomian Indonesia. Era Orde Lama Hingga Jokowi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- UNDP. (2017). *UNDP's Strategy for Inclusive and Sustainable Growth*. New York: UNDP.
- Vellala, P.S.; Madala, M. & Chhattopadhyay, U. (2014). A theoretical model for inclusive economic growth in Indian context. *International Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 4, no. 13, pp. 229-235.
- Wasudewa, A. A. N. G., Wijayanto, A. W., Iskandar, D. A., Watekhi, & Puri, I. A. W. R. I. (2024). Dampak investasi pada pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 116–132. <https://doi.org/10.29244/jekp.13.2.2024.116-132>.
- Wentworth, L., Schoeman, M. & Langalanga, A., 2015. *Foreign Direct Investment and Inclusive Growth in South Africa*, Cape Town: University of Cape Town.
- World Bank. (2018). *The little data book on financial inclusion 2018*. Washington, DC: World Bank. dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29654>
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N.E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. SERAMBI: Jurnal

Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 2 (3), 169–176.
<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>.

Zastrow, C. (2010). Introduction to social work and social welfare: Empowering people (10th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.
[Scribd+2Cengage Learning+2Cengage Learning+2](#).